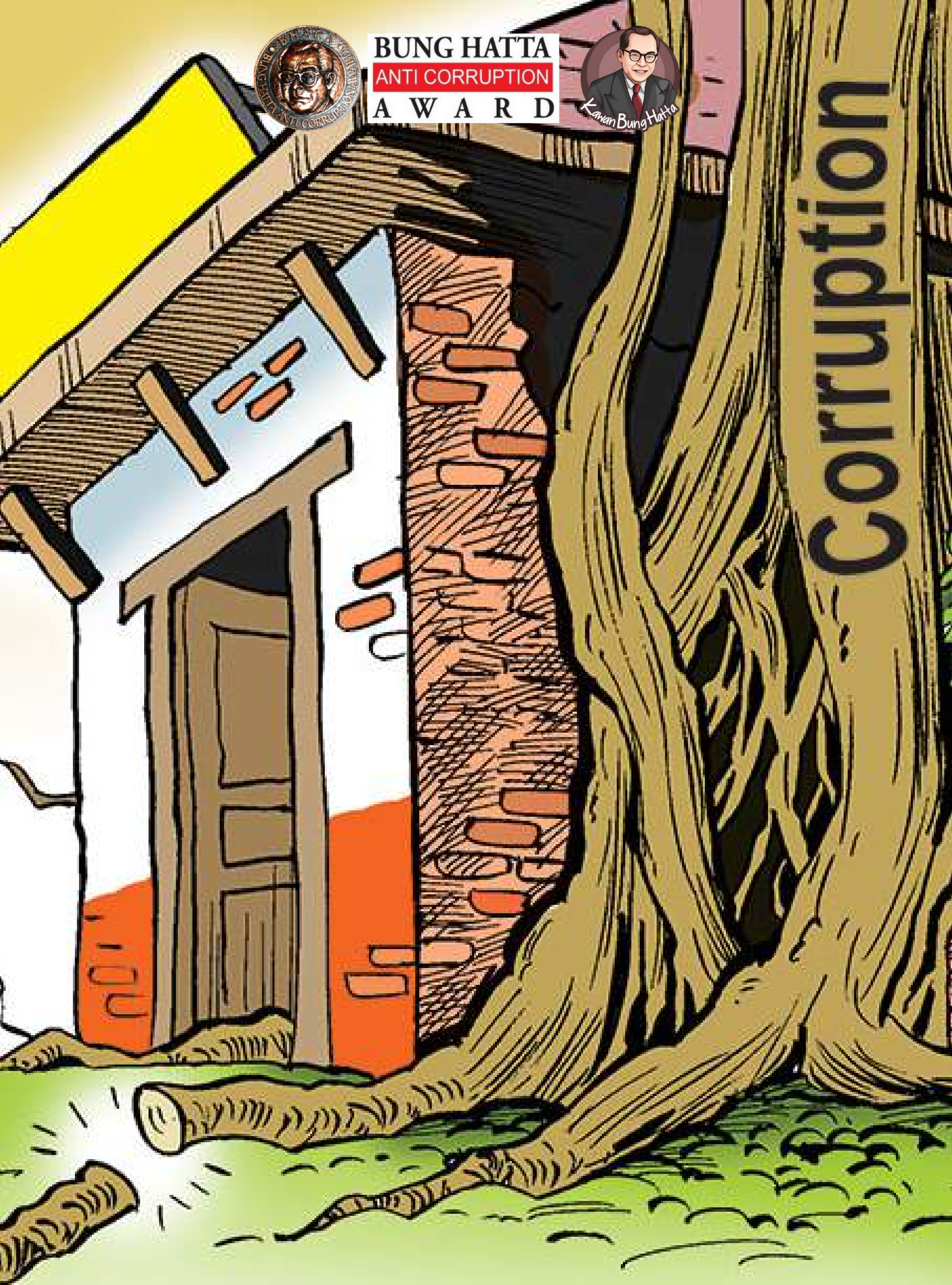




BUNG HATTA
ANTI CORRUPTION
A W A R D



DEMOKRASI, HAM, ANTIKORUPSI
BUNG HATTA

DEMOKRASI, HAM, ANTIKORUPSI BUNG HATTA

PENULIS

Ahmad Faisal Dinejad
Akhmad Idris
Annisa Siswanti
Atha Nursasi
Daniel Pradina Oktavian
Dendy Yuliyanto, SH
Epifanius Solanta
Janwan Tarigan
Karunia Haganta
Kurnia Ramadhana Banjarnahor
Kierby
Maria Goreti Ana Kaka
Muhammad Naufal
Muhammad Sayyid Hanafi
Nanang Suryana
Nazirwan Rohmadi, M. Pd
Pradikta Andi Alvat
Wahyu Ramadhan Rahmat Hr
Yulita Heti Sujaya, M.Pd

Editor

Korneles Materay

Dipublikasikan pertama kali pada:
November 2022

DITERBITKAN OLEH



BUNG HATTA
ANTI CORRUPTION
A W A R D

BUNG HATTA ANTI CORRUPTION AWARD (2022)

Website : www.bunghattaward
Instagram: @BungHattaAward
Twitter : @BungHattaAward
Facebook : @BungHattaAward
Youtube : Bung Hatta Award BHACA

Sekapur Sirih

Bung Hatta merupakan anugerah yang pernah diberikan kepada bangsa Indonesia. Gagasan, sikap dan lakunya merupakan warisan berharga. Meskipun telah berpulang 42 tahun lalu, ajaran dan teladan yang ditinggalkan tak terkubur melainkan semakin relevan. Hal ini bisa dipotret dari berbagai sudut mulai dari ekonomi, demokrasi, hak asasi manusia hingga antikorupsi.

Sang Proklamator dikenal sebagai ekonom ulung, juga peletak dasar demokrasi Indonesia. Beliau tokoh hak asasi manusia yang teramat penting dan sosok yang berintegritas tinggi karena kejujuran dan kesederhanaan serta upaya untuk melawan setiap bentuk penyimpangan sepanjang hidupnya.

Buku ini memuat 20 artikel terbaik dari lomba menulis artikel dalam rangka memperingati HUT ke-77 RI sekaligus HUT ke-120 Bung Hatta dengan tema “Demokrasi, HAM, dan Antikorupsi Bung Hatta” yang diadakan Perkumpulan BHACA pada 9-30 Agustus 2022. Para penulis yang berasal dari berbagai kalangan profesi dan lintas daerah telah berupaya untuk menggali pemikiran, gagasan, dan sikap hidup Bung Hatta.

Menariknya, tulisan-tulisan tak semata menggali pemikiran, memperlihatkan kekaguman pada sikap hidup pribadinya, melainkan dijadikan pisau analisis terhadap persoalan-persoalan aktual terkait tiga isu besar di atas.

Menuliskan Bung Hatta juga usaha untuk mengingatkan, menyadarkan, dan menuntun siapapun ke arah yang benar. Besar harapan buku ini menjadi rujukan belajar dan sumber inspirasi yang mampu membawa pembaca pada pengenalan pribadi dengan Bung Hatta. Terima kasih kepada seluruh peserta yang berusaha keras menyelami Bung Hatta lebih dalam melalui tulisan-tulisannya ini.

Selamat membaca.

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih	i
Daftar Isi	ii
Bung Hatta: Warisan Terbesar Indonesia	1
Etika Pancasila, Bung Hatta, dan Spirit Antikorupsi	2
Demokrasi Ala Bung Hatta Menyelamatkan Republik	3
Demokrasi dan Kepemimpinan Antikorupsi Bung Hatta	5
Mencari Bung Hatta di Kolong Meja	7
Menghormati Jasa Pahlawan Bukan Sekedar Mengheningkan Cipta	8
Gotong Royong Wujudkan Demokrasi yang Adil (Refleksi Kritis atas Pemikiran Bung Hatta)	10
Menjaga Uang Rakyat Ala Bung Hatta	11
Hatta: Demonstran "Beralmamater" Sejarah	13
Hatta dan Angan Antikorupsinya	14
Asketisme Politik Hatta	16
Buah Pikiran Bung Hatta sebagai Etos Kehidupan Berbangsa	17
Degradasi Moral di Tubuh Polri (Kasus Ferdy Sambo dan Kontradiksinya dengan Nilai Hidup Bung Hatta)	19
Hatta Tentang Demokrasi dan Bagi-Bagi Kursi	20
Bung Hatta Demokrasi, HAM, dan Antikorupsi	21
Suluh Keteladanan Bung Hatta	23
Kejujuran Kami Melarang Kami Jadi Penakut!	25
Menciptakan Hatta Dari Desa: Pemberantasan Korupsi Dana Desa	26
Hatta: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Antikorupsi	28
Quo Vadis: Semangat "Anti Korupsi"	30
Profil Penulis	31
Profil Perkumpulan BHACA	33

BUNG HATTA: WARISAN TERBESAR INDONESIA

Oleh: Ahmad Faisal Dinejad

77 tahun Indonesia merdeka. Membicarakan Indonesia tidak akan afdol jika tidak melibatkan nama Mohammad Hatta dalam perbincangan. Mohammad Hatta atau yang lebih dekat dengan nama Bung Hatta, merupakan salah satu tokoh yang memainkan peran paling sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dari buah pikirannya lahir kalimat awal naskah proklamasi. Peran sentral Hatta dalam perjuangan kemerdekaan, membuat lelaki kelahiran Bukit Tinggi Sumatera Barat tersebut dimandatkan oleh rakyat Indonesia menjadi wakil presiden pertama di republik ini. Pada saat itu ia berusia 43 tahun, satu tahun lebih muda dari Bung Karno.

Kesungguhan Hatta dalam memperjuangkan bangsa Indonesia lepas dari belenggu penjajahan, tidak seorangpun yang bisa menampik. Hatta bersumpah untuk tidak menikah sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaan, kemerdekaan yang sekian lama rakyat Indonesia nantikan, kemerdekaan yang telah lama Bung Hatta cita-citakan. Kemerdekaan yang dicita-citakan oleh Hatta bukan hanya lepas dari belenggu penjajahan. Tapi, bagaimana Indonesia bisa mencapai kemandirian nasional. Dengan kemandirian nasional, Indonesia sebagai sebuah negara tidak akan bergantung lagi kepada bangsa lain. Melalui gagasan kemandirian nasional, Hatta mencetus koperasi untuk kemandirian ekonomi rakyat. Menurutnya koperasi bisa menjadi sokoguru ekonomi Indonesia.

Hatta dikenal sebagai sosok yang pecinta buku, tidak ada yang meragukan. Hatta bahkan bersedia dipenjarakan asalkan bersama buku, sebab menurutnya dengan bersama buku ia merasakan kebebasan. Kecintaan inilah yang membuatnya melahap habis hampir semua jenis literatur selama kurang lebih 11 tahun tinggal di Belanda. Dari literatur yang paling barat hingga yang paling timur semua ia lahap habis. Kedekatan Hatta dengan buku membuatnya sangat fasih bicara tentang demokrasi. Tidak sekadar fasih, ia bahkan memiliki pemikiran mendalam tentang demokrasi.

Kedalaman pandangannya tentang demokrasi, membuat ia mengambil sikap untuk tidak sepaham dan mengkritik pandangan demokrasi barat. Hatta menilai konsep demokrasi yang ditawarkan barat lebih condong mengutamakan individualisme. Dengan demikian akan membuka peluang bagi para pemodal kapitalis menjadi paling digdaya dalam demokrasi seperti ini. Dan tidak akan terus tumbuh subur jika tidak ada kekuatan penyeimbang. Inilah kritikan mendasar Hatta tentang demokrasi ala barat. Hatta menilai, demokrasi yang ditawarkan barat membatasi kedaulatan rakyat hanya pada dimensi politik. Menurut Hatta, tidak akan terjadi kedaulatan autentik jika rakyat tidak berdaulat secara ekonomi. Inilah konsep demokrasi yang ideal menurut Hatta. Berdaulat dalam politik dan ekonomi.

Setidaknya ada beberapa poin konsep dasar dalam demokrasi, satu diantaranya adalah hak asasi manusia. Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan dalam menentukan hidup mereka. Hak inilah yang banyak diperjuangkan tokoh-tokoh besar dunia. Marthin Luther King Jr juga Nelson Mandela diantaranya.

Di Indonesia ada nama Munir Said Talib, pejuang HAM yang hidupnya berakhir tragis. Namun jauh sebelum Munir memberi perhatian serius terhadap isu hak asasi manusia, Hatta telah lebih dulu memperlihatkan sikapnya yang pro-HAM. Saat masih menjadi mahasiswa di Belanda, Hatta telah menggemparkan Belanda dengan sikapnya yang anti terhadap penindasan dan keterhinaan rakyat jajahan, diskriminasi, brutal, dan sikap yang menggolongkan pemuda Indonesia sebagai warga negara kelas tiga (*inlander*) di bawah Eropa dan *Vreemdem Oosterlingen*.

Menyelesaikan konflik ideologi pada kisruh piagam Jakarta yang mengatur asas kebertuhanan dan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya, adalah bukti Bung Hatta penganut demokrasi sejati yang sangat pro-HAM. Hatta memberi jaminan persamaan hak bagi semua warga negara, ia paham persis bahwa hak mendapatkan kebebasan beragama adalah bagian utama dalam HAM. Bung Hatta memang sosok pemikir hebat yang memilih sederhana. Sikapnya yang antikorupsi adalah mata air keteladanan untuk bangsa ini. Hatta lebih memilih hidup kekurangan dan sederhana, daripada menghinakan diri memanfaatkan kuasa dan pengaruhnya untuk kepentingan pribadi dan keluarga.

Kisah mesin jahit yang tidak bisa dibeli oleh istrinya, Rahmi; juga sepatu Bally yang sampai akhir hayat, Hatta tidak bisa memilikinya, adalah contoh yang paling dekat untuk menggambarkan kejujuran dan kesederhanaan sosok Hatta. Akan sangat sulit mendapatkan orang yang sepadan dengannya, Indonesia beruntung memilikinya.

Hatta dan Indonesia adalah dualitas yang tidak terpisah, seperti hitam dan putih pada bola mata. Tidak akan sempurna membicarakan Indonesia jika tidak mengikut-sertakan Bung Hatta. Ia tidak hanya dikenang sebagai Dwitunggal Proklamator Indonesia, tidak hanya meninggalkan gagasan tentang koperasi, demokrasi, kedaulatan rakyat sebagai bapak bangsa. Hatta lebih dari itu semua, jejak dan pemikirannya adalah salah satu warisan terbesar bangsa Indonesia.

Referensi:

- Pangeran Nagari Hutabarat. 2015. "Pemikiran Bung Hatta Tentang Demokrasi". Volume IV. <https://media.neliti.com>
- Seri Buku Tempo: Bapak Bangsa. "Hatta Jejak yang Melampaui Zaman".
- Bayu Galih. 2016. "Tekad Muhammad Hatta Tak Menikah Sebelum Indonesia Merdeka". Kompas.Com <https://bit.ly/3KvdIGY> (Diakses pada 29 Agustus 2022).
- Mahendra Bungalan. 2021. "Meutia: Bung Hatta Ingin Rakyat Punya Kemandirian Ekonomi". Suamemerdeka.com <https://bit.ly/3AX5nbV> (Diakses pada 29 Agustus 2022)
- Verelladevanka Adryamarthanino. 2022. "Peran Muhammad Hatta dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia". Kompas.Com <https://bit.ly/3TrXrqf> (diakses pada 30 Agustus 2022).

ETIKA PANCASILA, BUNG HATTA, DAN SPIRIT ANTIKORUPSI

Oleh: Akhmad Idris

Dalam sila Ketuhanan, korupsi dianggap sebagai sebuah dosa——dosa besar malah. Penyebabnya sederhana, karena koruptor dapat dianggap lebih setan dari setan. Kamus serba tahu, Kamus Besar Bahasa Indonesia memaknai setan dengan konotasi yang sangat negatif, yaitu roh jahat yang doyan menggoda manusia untuk melakukan kejahatan. Saking jahatnya, ungkapan 'setan' kerap digunakan untuk meluapkan kemarahan atau mengungkapkan sumpah serapah. Tak berlebihan jika 'setan' juga dimanfaatkan untuk menyebut 'manusia' dengan perangai buruk yang perangainya tak jauh berbeda dengan setan——saudara kembarnya.

Jika setan yang masih bersedia menanggung rasa sakit bersama-sama (masuk neraka berjamaah) sudah dianggap sebagai manifestasi kejahatan gegara tipu dayanya, maka siapapun yang sibuk melakukan tipu daya guna 'memperkaya' dirinya sendiri cum 'memiskinkan' pihak-pihak yang ditipu daya jauh lebih setan dari setan itu sendiri. Siapapun yang dengan membabi buta menyelewengkan uang negara untuk keuntungan pribadi, maka sederhana saja: setan pun akan tertawa dan berkata pada rekan-rekannya, "Ternyata ada yang lebih jahat dari kita, kawan-kawan."

Mereka lazim disebut sebagai koruptor, padahal menurut Prof. Dr. AG. H. Muhammad Quraish Shihab, Lc. M. A. nama 'koruptor' terlalu halus untuk menyebut mereka. Ada nama yang jauh lebih pantas untuk mereka, yaitu 'pencuri'! Sementara saya sendiri lebih nyaman menyebut mereka dengan yang lebih setan dari setan, sebab setan saja bersedia sepenanggungan dan se penderitaan, sedangkan mereka malah ingin menikmati keuntungan sendirian.

Sementara berdasarkan sila Kemanusiaan, para koruptor sama sekali tidak memanusiakan manusia. Tak salah jika mereka dicap sebagai penjahat. Ada sebuah nasihat bijak dari seorang filsuf Yunani Kuno, Epicurus, bahwa kekayaan tanpa batas adalah kemiskinan yang paling besar. Sialnya, hal inilah yang sedang dilakukan oleh para yang lebih jahat dari setan di Negeri ini. Saat sebagian besar rakyat sedang bersusah payah mempertahankan napas di tengah jeruji pandemi yang tidak pasti, nyatanya masih ada 'sosok' yang diam-diam mengantongi dana bantuan sosial untuk kepentingan pribadi. Mirisnya lagi, yang mengantongi dana tersebut sangat jauh dari kategori masyarakat tidak mampu. Mengamini perkataan Epicurus, sampai kapanpun dia akan menjadi 'sosok' yang paling miskin——sudah lebih jahat dari setan, miskin pula.

Para koruptor seharusnya dapat bercermin pada sikap Bung Hatta yang diceritakan oleh Iding Wangsa Widjaja (2002) dalam *Mengenang Bung Hatta*. Suatu ketika Bung Hatta tiba di Irian dan disodori sebuah amplop tebal yang berisi 'uang saku'. Respon Bung Hatta sangat membanggakan sekaligus mengharukan, sebab ia berkata dengan tegas, "Maaf saudara, itu uang rakyat. Saya tidak mau menerima. Kembalikan!"

Berlanjut pada sila Persatuan yang berarti para koruptor sama sekali tidak mementingkan urusan bangsa dan negara. Mereka hanya sibuk mengenyangkan perut mereka sendiri dengan mencuri uang milik bangsa dan negara. Pada dasarnya hal ini juga bertaut erat dengan sila Kerakyatan dan sila Keadilan. Tindak laku korupsi sangat jauh dengan cerminan demokrasi dan tidak secuil pun mencerminkan keadilan sosial.

Meskipun tak sedikit yang kecewa dan marah mati-matian pada mereka, namun masih banyak juga yang seolah tak peduli dan menanggapinya biasa-biasa saja. Alasannya sederhana, banyak orang yang masih tidak merasa bahwa yang dicuri adalah uang kita semua, sebagian besar uang rakyat-rakyat kecil yang rela menyisihkan sebagian kecil rezeki (dari rezeki yang tidak besar pula) untuk menunaikan kewajiban sebagai warga negeri yang baik.

Memang jumlah nominal yang diselewengkan menyentuh angka miliaran rupiah, sementara kita tak pernah merasa memiliki uang sebanyak itu. Angka sebanyak itu merupakan jumlah total seluruh rakyat Negeri ini, mulai dari pucuk barat hingga ujung timur, mulai dari jerih payahku; lelah letihmu; hingga peluh keringat mereka semua. Sudah saatnya kita semua membayangkan bahwa rasa lelah itu telah kita percayakan kepada 'mereka' agar dialokasikan untuk kepentingan bersama membangun negeri, namun malah digunakan untuk membayar honor artis dangdut yang kurang lebih sebesar 150 juta rupiah dan kepentingan-kepentingan pribadi lainnya.

Akhir kata, kita semua memang sudah seyogianya kecewa dan marah mati-matian pada yang lebih jahat dari setan tersebut. Bukan marah dan kecewa pada orangnya, tapi pada sifat rakus yang mengakar kuat di dalam hatinya. Kita semua harus membenci sifat yang lebih jahat dari setan itu, agar nantinya aku dan kamu semua tak pernah menginginkan sifat itu tumbuh dengan subur di hati. Semuanya sudah ada, yakni menerapkan etika-etika Sang 'Garuda' guna memberangus benih-benih korupsi sejak dini——bukan malah berkontradiksi dengan etika-etika Sang 'Garuda'. Mengutip ungkapan legendaris milik Wiji Thukul, hanya ada satu kata untuk sifat yang lebih jahat dari setan itu: Lawan!

DEMOKRASI ALA BUNG HATTA MENYELAMATKAN REPUBLIK

Oleh: Annisa Siswanti

Bung Hatta merupakan salah satu pahlawan kemerdekaan yang memiliki banyak peran baik sebelum dan sesudah penetapan kemerdekaan Indonesia. Drs. H. Mohammad Hatta adalah negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai wakil presiden yang pertama. Beliau bersama Soekarno memainkan peranan yang sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang sekaligus memproklamákannya pada 17 Agustus 1945.

Mohammad Hatta lahir tanggal 12 Agustus 1902 di Bukittinggi, Sumatera Barat. Wafat di Jakarta pada 14 Maret 1980. Ayahnya adalah seorang ulama yang bernama Haji Muhammad Jamil. Meninggal pada usia 30 tahun, ketika Bung Hatta berusia delapan bulan. Ibunya bernama Siti Saleha yang berasal dari keluarga pengusaha yang terpandang di Bukittinggi (Itang, 2016: 5-6).

Siapa yang tidak mengenali sosok Bung Hatta, seorang yang cerdas dengan didikan orang tua yang terpandang. Dari kecil ia sudah terlatih untuk mengelola keuangan, mulai dari pemasukan sampai pengeluarannya. Selain itu, pendidikannya yang terdidik ia geluti sehingga ia sampai ke Belanda untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Ketika di Belanda ia selalu memberikan kritikan atas sistem demokrasi Barat. Karena, Bung Hatta tidak sependapat dengan demokrasi ala Barat.

Buah Pikir Bung Hatta tentang Demokrasi

Demokrasi merupakan bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut (Budiardjo, 1985: 50). Demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi adalah cara bernegara yang telah disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia untuk menjalankan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demokrasi merupakan bentuk ketidaktundukkan bangsa Indonesia kepada kaum penjajah manapun. Seperti yang diikrarkan oleh bangsa Indonesia dalam pembukaan Undang-undang 1945: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

Sejak awal para pendiri bangsa sepakat bahwa demokrasi Indonesia yang dianut merupakan demokrasi yang bersumber dari kebiasaan bangsa sendiri, bukan demokrasi liberal atau demokrasi komunis. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan berpikir, berserikat, dan juga berkumpul, tetapi di lain pihak demokrasi Indonesia juga menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah (Asriana, 2018: 30).

Bung Hatta memiliki konsep pemikiran yang sudah dirancang tentang demokrasi kerakyatan. Demokrasi kerakyatan ini bertujuan untuk mengubah masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan demokrasi ini sangatlah berbeda dengan demokrasi Barat. Hatta bahkan melandaskan pemikirannya tentang demokrasi untuk Indonesia, melihat dari segi kelemahan-kelemahan yang terkandung dalam demokrasi Barat serta kesesuaiannya dengan sifat masyarakat Indonesia.

Pemikiran Hatta tentang demokrasi Indonesia memang berbeda dengan prinsip-prinsip demokrasi di Barat, walaupun beliau menimba ilmu di sana. Hatta mendasarkan praktiknya demokrasi dan mengutarakan dengan tiga sumber pokok demokrasi yang sudah mengakar di Indonesia.

Pertama, sosialisme Barat yang membela prinsip-prinsip humanisme, sementara prinsip-prinsip ini juga sekaligus sebagai tujuan. Kedua, ajaran Islam memerintahkan untuk melakukan kebenaran dan keadilan Tuhan dalam masyarakat. Ketiga, pola hidup dalam bentuk kolektivisme yang sebagaimana telah dilakukan di desa-desa wilayah Indonesia (Maarif, 1999: 2).

Ketiga sumber inilah yang menjamin kelestarian demokrasi di Indonesia. Hatta pernah mengemukakan sebagai berikut: "Berdasarkan kepada pengalamannya di benua Barat, dan bersedia pula dalam susunan masyarakat desa Indonesia yang asli, kita dapat mengemukakan kedaulatan rakyat yang lebih sempurna sebagai dasar pemerintahan Negara Republik Indonesia. Kedaulatan kita memiliki kedua-duanya; demokrasi politik dan demokrasi ekonomi dengan mudah kita dapat mengemukakannya, oleh karena masyarakat kita tidak mengandung penyakit individualisme. Pada dasarnya masyarakat Indonesia masih bersendi kepada kolektivisme" (Suleman, 2010: 182).

Banyak yang menyatakan bahwa buah pikir Bung Hatta sangatlah cemerlang tentang berdemokrasi. Bung Hatta sangat menerima buah pikir dari masyarakat untuk dimusyawarahkan. Namun, jika kita lihat dan kita kaji saat ini, kita banyak menemukan bahwa sistem demokrasi Indonesia semakin menurun. Terdapat pada 'tempo.co bicara fakta' tentang keadaan Indonesia yang dipaparkan oleh Dosen University of Sydney, ia mengatakan bahwasannya sekarang ini terjadi pelemahan pada indikator demokrasi, yaitu pemilu dan oposisi resmi, lembaga penegakan hukum dan lembaga yudisial yang independen, media yang bebas dan berkualitas, serta oposisi tidak resmi dan kesempatan untuk berunjuk rasa.

Dahulu Bung Hatta menolak untuk berpaham individualisme, karena akan mengakibatkan penyakit kepada bangsa Indonesia, karena Bung Hatta menjunjung tinggi nilai-nilai bermufakat, bebas berpikir, bermusyawarah dan sebagainya. Namun, apa yang terjadi sekarang? Tiada yang meneruskan buah pikir Bung Hatta. Segalanya dapat ditentukan dari para manusia berdasi elite. Demokrasi sudah luntur, harapan rakyat hancur. Sudah mendekati pemilu serentak 2024, ada baiknya bangsa Indonesia memberikan demokrasi yang sehat. Untuk kita para pemuda Indonesia, bawalah Indonesia ke arah perubahan yang lebih baik ke depannya, karena kita sudah dipersiapkan untuk mewujudkan Indonesia emas 2045.

Referensi:

- Asriana, R. L. (2018, Desember). Kajian Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Civicus*, 18, 30.
- Budiardjo, M. (1985). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Itang. (2016). *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta*. Serang baru: Laksita Indonesia.
- Maarif, A. S. (1999). *Nasionalisme, Demokrasi, dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Perpustakaan Hatta.
- Noer, D. (1990). *Biografi Politik Bung Hatta*. Jakarta: LP3ES.
- Suleman, Z. (2010). *Demokrasi Untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta*. Jakarta: Kompas.
- Tugiyono. (1998). *Dwi Tunggal Soekarno Hatta Pahlawan Proklamator Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta.

DEMOKRASI DAN KEPEMIMPINAN ANTIKORUPSI BUNG HATTA

Oleh: Atha Nursasi

Demokrasi yang baik adalah demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), mempraksiskan keadilan dan kesetaraan tanpa diskriminatif. Demokrasi seperti ini sudah tentu menempatkan wacana antikorupsi sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa. Bung Hatta adalah sosok negarawan yang memberi contoh baik bagaimana demokrasi dipahami dan dipraktikkan. Sikap antikorupsi menjadi salah satu ciri dan karakter kepemimpinan Bung Hatta, bahkan ia dengan tegas menyatakan para pelaku korupsi perlu dijerat dengan hukuman seberat-beratnya. Sebuah karakter yang sulit dijumpai dari kebanyakan para pemimpin politik bangsa hari ini.

Dalam sebuah surat kabar Kompas edisi 23 September 1970, Bung Hatta mengatakan “seorang koruptor harus dijatuhi hukuman terberat. Kala itu, Bung Hatta mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa korupsi di Indonesia bisa hilang dengan undang-undang yang ada asalkan para pejabat yang berwenang mau bertindak. Menurutnya, untuk memberantas korupsi tak perlu menciptakan undang-undang lain, sebab seribu macam undang-undang diciptakan akan tidak berguna jika moral dari yang berwenang sudah bejat.” Pernyataan ini cukup menggugah dan nampaknya membuktikan bahwa problem korupsi bukan karena ketiadaan undang-undang yang tegas mengaturnya, melainkan rusaknya moral kekuasaan para penyelenggara negara yang sedari awal menempatkan posisi dan jabatan kekuasaan semata-mata alat memupuk kekayaan, sekalipun itu berasal dari subsidi rakyat, pajak dan retribusi.

Mengenal Gagasan Demokrasi Bung Hatta

Sejarah Indonesia sejak sepuluh tahun terakhir ini banyak memperlihatkan pertentangan antara idealisme dan realita. Idealisme yang bertujuan menciptakan suatu pemerintahan yang adil, yang akan melaksanakan demokrasi yang sebaik-baiknya, dan kemakmuran yang sebesar-besarnya. Sementara realita saat ini, pemerintah yang dalam perkembangannya kelihatan semakin jauh dari demokrasi yang sebenarnya” (Hatta, 1966: 6). Pernyataan itu disampaikan Hatta pada 10 tahun pertama pasca kemerdekaan, kira-kira pada tahun 1955, antara tujuh sampai delapan dekade lalu hingga kini pernyataan Hatta masih relevan untuk direfleksikan.

Demokrasi semakin jauh dari tujuannya, hak asasi manusia semakin sulit ditegakkan, sementara korupsi dalam rantai sejarahnya terus bereproduksi beriringan dengan dinamika kekuasaan yang berkembang. Diskursus tentang demokrasi, HAM dan korupsi selalu linier dalam transisi kekuasaan rezim. Dari Orde Lama (pasca Kemerdekaan), Orde Baru (rezim otoritarian) hingga fase paling modern dari demokrasi (reformasi), ketiga hal tersebut tak pernah terlewatkan. Sebaliknya, realitas politik dan ekonomi hari ini justru menempatkan demokrasi, HAM dan Korupsi sebagai topik pokok di setiap diskursusnya.

Berbagai ilmuwan sosial, ekonomi, dan politik melihat gejala demokrasi dalam bentang sejarah kemerdekaan memiliki kecenderungan yang menyimpang dari tujuan asalnya. Beragam pelabelan disematkan untuk menunjukkan kondisi demokrasi hari ini. Dari degradasi, regresi hingga demokrasi mati. Pendapat semacam ini wajar saja sebagai sebuah diskursus, mengingat praksis demokrasi tak lagi mendasarkan diri pada perilaku demokratis yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, melainkan sebagai instrumen akumulasi bagi segelintir penguasa.

Bung Hatta dalam buku “Demokrasi Kita” pernah menyampaikan kritik serupa. Kritik tersebut merespon pandangan khalayak terhadap praktik demokrasi yang semakin menyimpang sehingga membuat demokrasi Indonesia kala itu lenyap. Tetapi bagi Hatta demokrasi Indonesia kala itu tidak sedang lenyap, tetapi sedang mengalami krisis.

Sebab, bagi Hatta, demokrasi bisa tertindas sementara karena kesalahannya sendiri, tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh keinsafan. Berlainan dari beberapa negara lain di Asia, demokrasi di sini berurat akar di dalam pergaulan hidup. Sebab itu, ia tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya.

Kondisi serupa juga sedang menimpa Indonesia hari ini, bahkan jauh lebih mengkhawatirkan. Jika Hatta berpendapat kondisi demokrasi kala itu sedang mengalami krisis, atau krisis demokrasi dan bukan lenyap karena tidak kenal batas kemerdekaannya, lupa syarat-syarat hidupnya, dan melulu menjadi anarki, lambat laun akan digantikan diktator, kondisi hari berbalik arah. Bahwa demokrasi yang hidup, berkembang dan dipelihara oleh rezim hari ini adalah demokrasi oligarki, sebuah demokrasi yang seluruh sistem dan tatanan pemerintahan seperti institusi sosial, ekonomi, politik, hukum dan kebudayaan dikuasai sepenuhnya oleh segelintir orang guna mempertahankan formasi kekuasaan mereka sekaligus juga melipatgandakan kekayaan ekonomi secara bersamaan.

Meski begitu, kritik Bung Hatta terhadap kondisi demokrasi kala itu tidak menunjukkan rasa pesimisme dalam dirinya dan terhadap upaya perjuangan terhadap demokrasi Indonesia di masa mendatang. Dalam buku “Demokrasi Kita” bagian Liga Demokrasi, Hatta menyampaikan bahwa “Apabila Liga Demokrasi dapat meletakkan fondasi dan sendi-sendi pokok ini dalam membangun kembali demokrasi Indonesia yang dalam krisis, besar harapan ia dapat menjadi pelopor dalam merintis jalan kembali ke demokrasi Indonesia yang sehat.” Pernyataan ini dapat menjadi pijakan bagi seluruh elemen sosial pro demokrasi, sebagai panduan optimisme perjuangan merebut demokrasi dari cengkaman oligarki-korup. Membuat sendi pokok perjuangan demokrasi dengan memegang teguh prinsip demokrasi Indonesia yang asli: rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir dari daerah kekuasaan raja (rezim oligarki-korup untuk konteks sekarang).

Kepemimpinan yang Antikorupsi

Keteguhannya dan kesungguhannya dalam memperjuangkan demokrasi Indonesia selama hidupnya, ia tak pernah mengambil keuntungan apapun dari negara, sekalipun merupakan fasilitas negara. Dalam sebuah opini berjudul “Meneladani Bung Hatta: “Maaf itu Uang Rakyat, Saya Tak Mau Terima” yang diterbitkan oleh Detik.com pada (15/03/2017), dikisahkan bahwa, setelah menjadi wakil presiden, pada satu kesempatan, kira-kira sekitar tahun 1970, Bung Hatta diberi kesempatan oleh negara untuk berkunjung ke Irian Jaya (Papua). Pada kesempatan itu, Bung Hatta sempat diberi bingkisan berupa amplop oleh seorang pejabat tetapi ia menolaknya lalu berkata, “maaf, itu uang rakyat, saya tidak boleh terima, kembalikan!”

Ketegasan Bung Hatta dalam menerapkan prinsip antikorupsi tidak hanya di hadapan para pejabat, tetapi telah menjadi perilaku baik dalam kehidupan sosialnya. Dalam artikel yang sama, Bung Hatta dicitrakan pernah menegur keras ajudannya karena menggunakan tiga helai kertas dari kantor kesekretariatan negara. Pada soal yang sama, putri kedua Bung Hatta juga mendapat teguran serupa karena menggunakan amplop berkop konsulat jenderal RI.

Sekalipun para elit politik suka mendengungkan tentang demokrasi, HAM dan antikorupsi setiap musim pemilu tiba, tetapi sukar menemukan keteladanan antikorupsi dalam diri mereka di alam demokrasi yang katanya terbuka. Jangankan menolak pemberian amplop seperti halnya dipraktikkan Bung Hatta, untuk merencanakan anggaran yang proporsional berdasarkan kebutuhan saja sulit ditemukan. Alih-alih bersikap adil dan bertanggung jawab, elit politik-birokrat justru memanfaatkan kewenangan itu untuk mengambil keuntungan di setiap kesempatannya. Pejabat hari ini hanya pintar bersilat lidah perihal antikorupsi, tapi tong kosong dalam praksis bernegara.

Akhirnya, yang dapat dipelajari dari kepemimpinan Bung Hatta adalah kegigihan dan keberaniannya menentang perilaku korupsi yang dilandasi sikap kesederhanaan, kejujuran, dan Integritas tinggi. Ketiga elemen kunci ini menjadi pijakan dalam setiap upaya membangun kehidupan demokrasi yang berkeadilan dan antikoruptif di masa mendatang.

Referensi:

- Mohammad Hatta. (1966). “Demokrasi Kita,” Pustaka Antara PT, Jakarta.
- Aryo Purtanto Saptohutomo, “Mohamad Hatta dan Gelombang Antikorupsi Masa Orde Baru” Kompas.com 14/02/22
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/14/07040051/mohammad-hatta-dan-gelombang-antikorupsi-masa-orde-baru?page=all> diakses 22/08/22
- Pasti Libert Mappapa, “Meneladani Bung Hatta: “Maaf Itu Uang Rakyat, Saya Tak Bisa Terima” Detik.com, 15/03/22
- <https://news.detik.com/berita/d-3446983/meneladani-bung-hatta-maaf-itu-uang-rakyat-saya-tak-mau-terima> diakses 23/08/22

MENCARI BUNG HATTA DI KOLONG MEJA

Oleh: Daniel Pradina Oktavian

“Der Mensch ist, war est igt” demikian bunyi pepatah Jerman yang menjadi salah satu pedoman hidup Bung Hatta. Artinya, sikap manusia sepadan dengan caranya mendapatkan makan.

Bung Hatta sungguh memberi teladan sesuai dengan pedoman hidupnya itu. Ia pernah menolak saat disodori uang sebesar Rp6 juta oleh sekretaris kabinet untuk keperluan operasional selama menjabat sebagai wakil presiden. Ia malah meminta uang itu dikembalikan kepada negara.

Lain cerita, Bung Hatta sangat ingin memiliki sepatu bermerk Bally. Namun, karena keterbatasan uang, ia tak pernah memilikinya. Padahal, sebagai pejabat negara, ia bisa sangat mudah mendapatkannya. Potongan iklan yang berisi alamat penjualsepatu Bally akhirnya menjadi saksi keinginan Bung Hatta yang tak tercapai sampai cerita ini begitu melegenda.

Dua kisah pendek tersebut sangatlah unik dan begitu kuat menggambarkan sosok Bung Hatta yang khas. Ia begitu rigid dalam membedakan sesuatu yang pantas dan yang tak pantas ia terima. Kejujurannya tegak lurus dengan perbuatan yang ia lakukan.

Kepribadian Bung Hatta yang jujur, sabar, dan sederhana seolah bertolak belakang dengan apa yang biasa kita hadapi dewasa ini. Tak jarang kita melihat pejabat publik yang begitu rakus dan tamak mengutamakan kekayaan diri dan golongannya.

Tak terhitung lagi berapa banyak pejabat publik yang sudah terjerat pidana korupsi. Begitu melekatnya perilaku korup dengan pejabat pemerintahan negara kita, membuat sebagian diantara kita menjadi sangat permisif dengan perilaku tersebut.

Malahan, kadang kala menjadi bagian di antaranya. Adalah mantan Bupati Kudus, Muhammad Tamzil, yang pernah dua kali terjerat kasus korupsi. Pertama, ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan sarana prasarana pendidikan dan bebas pada 2015. Kemudian, pada 2018 ia terpilih lagi menjadi Bupati Kudus dan pada tahun yang sama terjerat kasus suap pengisian jabatan. Terpilihnya Tamzil menunjukkan betapa permisifnya masyarakat terhadap tindak pidana korupsi yang telah merugikan mereka.

Dalam beberapa edisi pemilu terakhir, sikap masyarakat terhadap perilaku korup para pejabat juga mengalami ujian dan tekanan. Kita diributkan dengan isu boleh atau tidaknya seorang mantan narapidana tindak pidana korupsi (tipikor) mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Sebagai isu, ini memang bukan barang baru. Sebelumnya, kita pernah diributkan juga mengenai wacana mantan narapidana tipikor mencalonkan diri menjadi kepala daerah.

Substansi polemiknya sama, di satu sisi, mereka yang pernah terjerat pidana korupsi dinilai tak layak karena diragukan kapabilitas dan integritasnya. Lain sisi, hak politik mantan narapidana harusnya tetap dijamin kecuali ada ketentuan lain yang mengurangnya.

Kita menghadapi dilema. Bolehkah kita mencabut hak politik mantan narapidana korupsi tatkala mereka telah menjalani masa hukumannya? Atau siapkah kita membiarkan mereka kembali memimpin dengan keraguan dan kekhawatiran yang begitu besar?

Hak politik untuk dipilih memang sudah selayaknya diberikan kepada siapapun sejauh sesuai ketentuan undang-undang. Namun, jangan lupa, bahwa hak politik masyarakat tak hanya sebatas hak untuk memilih, melainkan juga hak untuk memilih calon-calon potensial yang memiliki kompetensi dan reputasi yang baik.

Pada titik ini dilema kita diterangi oleh moralitas sehingga meskipun mantan narapidana korupsi boleh kembali mencalonkan diri, masyarakat pun memiliki hak untuk mendapatkan sosok yang ideal bagi mereka. Konteks ini, kita manfaatkan untuk mencari sosok ideal sesuai teladan Bung Hatta.

Penulis cukup memahami, di tengah-tengah disrupsi demokrasi yang begitu riuh, sulit rasanya kita mencari sosok seideal Bung Hatta. Demokrasi kita seolah sedang mengalami sakit yang akut. Demokratisasi politik yang kita lihat hanyalah sebuah ilusi untuk menutupi buasnya nafsu pejabat menguasai setiap jengkal kepentingan negara ini. Lalu, masih mungkinkah kita mencari sosok seperti Bung Hatta?

Teladan Bung Hatta selalu hadir melintasi zaman dan generasi. Perbuatan dan nilai-nilainya masih tertuang dalam beragam tulisan yang bisa kita baca dan dapat kita ajarkan. Demokrasi yang sekarang bersifat transaksional bawah meja harus kita sadari telah menjadi bagian dari tubuh kita dan tak bisa kita naifkan lagi. Maka, teladan Bung Hatta haruslah juga dibawa ke bawah meja dimana banyak tangan-tangan kotor yang perlu dibersihkan. Nilai-nilai yang Bung Hatta wariskan hendaknya bukan hanya menjadi mercusuar di pinggir pantai, melainkan juga menjadi lentera kecil yang menerangi kegelapan yang paling dekat dengan kita.

Referensi:

- Bung Hatta, Demokrasi Kita (Bandung:Sega Arsy)
- Salman Alfarizi, Mohammad Hatta Biografi Singkat 1902-1980 (Jogjakarta: Grasi House of Book)
- <https://news.detik.com/berita/d-3446983/meneladani-bung-hatta-maaf-itu-uang-rakyat-saya-tak-mau-terima> diakses tanggal 24 Agustus 2022, pukul 19.00
- <https://bunghattaaward.org/korupsi-sebagai-sebuah-krisis/> diakses tanggal 24 Agustus 2022, pukul 20.00

MENGHORMATI JASA PAHLAWAN BUKAN SEKEDAR MENGHENINGKAN CIPTA

Oleh: Dendy Yuliyanto, SH

77 Tahun silam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno dan didampingi Mohammad Hatta, itu bertanda bangsa Indonesia telah merdeka dari segala belenggu penjajahan pemerintah kolonial Belanda. Kolonialisme bertujuan untuk mencari dominasi ekonomi dari sumber daya, tenaga kerja, dan pasar wilayah tersebut. Masa kolonialisme identik dengan penjajahan dan eksploitasi sumber daya manusia maupun sumber daya alam.

Pendiri bangsa Indonesia memilih konsep negara kesejahteraan (welfare state) dalam proses pembentukan negara Indonesia. Kesejahteraan rakyat menjadi dasar dan tujuan negara Indonesia merdeka, ringkasnya keadilan masyarakat atau keadilan sosial. Untuk menghargai jasa-jasa pahlawan bukan sebatas mengheningkan cipta pada saat upacara bendera di hari kemerdekaan saja. Seyogianya pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan hingga sekarang harus bertanggung jawab mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Negara Indonesia yang kaya akan sumber daya alam meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya seperti kekayaan hutan, perkebunan, kelautan, emas, batu bara, nikel, bauksit, minyak dan gas bumi serta barang-barang tambang lainnya. Dengan kekayaan alam yang melimpah, banyak pihak yang berbondong ingin melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Hal itu dapat menarik penanam modal asing masuk untuk menanamkan modalnya. Apakah hasil pengelolaan SDA hanya untuk pemodal saja? Tidak.

Pemerintah Indonesia seyogianya dalam hal pengelolaan SDA mengimplementasikan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Dalil untuk “kepentingan umum dan kemakmuran rakyat” hanya pemanis belaka. Namun, faktanya berbanding terbalik ketika pengelolaan SDA tidak dikelola dengan baik, maka bisa berakibat terjadinya kerusakan lingkungan dan bahkan bencana. Selain itu, berdampak buruk terhadap kondisi sosial yakni masyarakat kehilangan wilayah kelola sehingga miskin dibuat negara. Kenapa demikian? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja mengelola dan memanfaatkan alam sebagai sumber pemenuhan kebutuhan dasarnya baik dari tanah maupun hasil laut. Jika wilayah kelola diambil, maka masyarakat akan susah payah mencari kebutuhan dasarnya.

Konsep “kemakmuran rakyat-sentris” menurut Hatta yakni mendahulukan tercapainya kemakmuran rakyat banyak. Segala eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam kita—minyak, gas bumi, timah dan sebagainya; baik yang onshore maupun offshore, di atas pantai maupun lepas-pantai boleh saja dikerjakan oleh swasta, kalau negara belum berdaya sepenuhnya. Namun, kesemuanya itu harus “dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dan sekali-kali tidak untuk kemakmuran dan kemewahan minoritas elit atasan dan berkuasa”.

Problematika pengelolaan sumber daya alam merupakan bagian dari kebijakan perekonomian suatu negara yang tertuang dalam setiap konstitusi negaranya. Kebijakan perekonomian nasional negara Indonesia termaktub dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 ini menjadi penanda bahwa negara harus aktif membangun kesejahteraan sosial. Dengan demikian jelas bahwa secara konstitusional negara Indonesia menganut sistem negara hukum yang dinamis atau negara kesejahteraan (welfare state) yang dalam rangka pencapaian tujuannya menuntut konsekuensi bagi besarnya peranan negara.

Menurut Prof. Supancana, penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 memiliki pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas dari pada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik, dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut tercakup pula pengertian pemilikan publik oleh rakyat secara kolektif.

Orientasi dalam mewujudkan keadilan sosial perlu diarahkan pada tiga hal yang merupakan satu kesatuan yang utuh, yaitu: 1) mewujudkan keadilan sosial; 2) meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi; dan 3) pelestarian lingkungan dan pola penggunaan tanah yang berkelanjutan.

Kongkritnya tanggungjawab negara adalah untuk pembebasan rakyat dari kemiskinan, kebodohan, ketergantungan dan ketidakadilan. Hal itu sesuai dengan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya bagian I Pasal 2 ayat 2. Indonesia adalah negara yang mengakui nilai-nilai universal hak asasi manusia, maka negara memiliki kewajiban untuk melindungi (to protect), menghormati (to respect) dan memenuhi (to fulfill) hak-hak dasar warga negara.

Referensi:

- Aman, Indonesia Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme /Aman Ed. 1, Cet. 1. Yogyakarta: Pujangga Press, 2014. hal, iv.
- Azhary, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya. UI Pres. Jakarta. 1995, hal, 116.
- Anan Chandrawulan, Hukum Perusahaan Multinasional, Bandung:Keni Media, 2016, hal.164.
- Muhammad Hatta, dkk, Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Mutiara. 1977, hal.35.
- Jimly Asshiddiqie, Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Jakarta:Sinar Grafika,2009, hal. 142.
- Moh. Mahfud MD, Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan, Cet.Kedua, Jakarta:Rineka Cipta, 2003, hal. 133.

GOTONG ROYONG WUJUDKAN DEMOKRASI YANG ADIL (REFLEKSI KRITIS ATAS PEMIKIRAN BUNG HATTA)

Oleh: Epifanius Solanta

Prolog

Dalam sebuah karyanya berjudul *Tonggak-Tonggak di Perjalananku*, Ali Sastroamidjojo mengutip pernyataan Bung Hatta sebagai berikut “Kalau mandi, janganlah memakai air sesukanya sendiri. Saya sudah mengukur isi tempat air mandi dan ternyata airnya cukup kalau saudara-saudara masing-masing hanya memakai 10 gayung tiap-tiap kali mandi”. Apa yang disampaikan oleh Bung Hatta dalam gaya bahasanya yang paling sederhana setidaknya menjadi penegas awal akan makna demokrasi itu sendiri. Sejak awal, penulis meletakkan tesis dasar dari tulisan ini bahwa demokrasi itu syarat dengan keadilan.

Demokrasi Kita Harus Adil

Sebagaimana yang ditegaskan pada prolog di atas, bahwa demokrasi itu syarat dengan keadilan. Tentu keadilan yang dimaksud bukan hanya pada satu dimensi saja, misalnya keadilan dalam politik atau keadilan dalam ekonomi. Keadilan harus mencerminkan seluruh aspek kehidupan manusia. Hal ini sudah sejak awal diamanatkan oleh Bung Hatta dalam bukunya yang berjudul “Demokrasi Kita”. Hatta menegaskan bahwa demokrasi yang sehat menghendaki kesederajatan hingga taraf tertentu dari basis ekonomi dan sosial. Demokrasi tidak melulu soal pemenuhan hak-hak sipil dan politik, tetapi juga dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Jika kita bercermin pada Indeks Demokrasi 2021 yang diluncurkan The Economist Intelligence Unit (EIU) pada awal Februari 2022, skor rata-rata Indonesia mencapai 6,71% dalam skala 0-10. Artinya, makin tinggi skor, makin baik kondisi demokrasi suatu Negara. Meski demikian, angka tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan wajah demokrasi Indonesia yang adil. Hal ini ditandai oleh masih banyaknya persoalan ketidakadilan dalam alam demokrasi di Indonesia.

Demokrasi Berkeadilan di Indonesia?

Pertanyaan penting yang diajukan pada poin ini adalah sudah kita mempraktikkan demokrasi yang adil di Indonesia? Tentunya pertanyaan ini tidak bermaksud untuk mengobarkan api pesimisme penulis akan kondisi dan situasi demokrasi di Indonesia saat ini. Melainkan untuk memeriksa kembali beragam persoalan yang sejatinya tidak mencerminkan pemikiran demokrasi menurut Bung Hatta.

Bung Hatta sejatinya menjadi peletak awal konsep demokrasi yang adil. Bahkan, Hatta tak sekedar membumikan apa itu demokrasi yang adil, melainkan menampilkan sikap kritis dan tegasnya dengan jalan memilih mundur dari kursi wakil presiden karena Soekarno semakin otoriter. Hatta menyadari bahwa pemikiran-pemikiran baiknya sudah tidak sejalan lagi dengan pemikiran Soekarno. Bahkan Hatta dengan tegas mengkritik kerja pemerintah soal kesejahteraan rakyat.

Berikut adalah kritikan Hatta “dimana-mana orang merasa tidak puas. Pembangunan dirasakan tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti yang diharapkan. Kemakmuran rakyat yang dicita-citakan masih jauh saja. Sedangkan nilai uang makin merosot. Rencana yang terlantar banya sekali. Keruntuhan dan kehancuran barang-barang capital tampak dimana-mana, seperti rusaknya jalan-jalan raya, irigasi, pelabuhan, berkembangnya irosi, dan lain-lain.”

Kritik Hatta di atas mendapatkan ruang pemenuhan dalam alam demokrasi di Indonesia saat ini. Hal ini dapat kita saksikan dari banyaknya persoalan yang menjadi penanda penurunan kualitas demokrasi Indonesia. Pada era kepemimpinan Presiden Jokowi, misalnya, terdapat beberapa peristiwa kontroversial yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi.

Sebagai contoh, kasus yang menimpa BEM Universitas Indonesia yang menjuluki Presiden Jokowi “king of lip service” karena dianggap banyak mengumbar janji yang berakhir dengan dipanggilnya 10 anggota BEM oleh Rektorat UI sekaligus beberapa media sosial anggota BEM yang tidak bisa diakses. Belum lagi dengan adanya kriminalisasi para pendemo oleh polisi pada tahun 2021 silam yang bertepatan dengan HUT Kabupaten Tangerang. Mahasiswa di-smackdown hingga berakhir terbaring di rumah sakit, hal ini menunjukkan terjadi distorsi pengamanan yang ditunjukkan sikap represif aparat keamanan. Fenomena represivitas tersebut bisa dikatakan merupakan konsep pembungkaman dan tidak bebasnya masyarakat untuk berekspresi di muka umum.

Gotong Royong Wujudkan Demokrasi yang Adil

Bung Hatta dalam karyanya “Demokrasi Kita” berkali-kali menegaskan kembali spirit masyarakat Indonesia yaitu nilai gotong-royong. Bagi Hatta, nilai gotong royong sejatinya menjadi petunjuk dan pemandu dalam menghantarkan setiap kerja dan kebijakan menuju nilai keadilan dan kesejahteraan. Tentunya kita sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Hatta. Nilai gotong-royong harus menjwai hari-hari hidup kita, termasuk dalam memuluskan jalan mewujudkan demokrasi yang adil.

Gotong-royong tak semestinya diterjemahkan dalam perilaku kerja bakti. Tetapi melampaui praktek itu, gotong-royong juga termasuk dalam kerja partisipatif dan kolaboratif antara pemerintah dan rakyat dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadilan. Rakyat ikut berpartisipasi dalam mengkritisi dan mengawasi jalannya pemerintahan yang demokratis. Begitu juga, pemerintah ikut menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berlandaskan pada kebutuhan rakyat, bukan kepentingan politik segelintir orang.

Epilog

Demokrasi yang adil itu sejatinya harus ada dan datang sejak dalam pikiran dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demokrasi itu dikatakan adil tatkala ruang-ruang kebutuhan hidup (baik rakyat maupun pemerintah) senantiasa terpenuhi. Artinya tidak ada ketimpangan. Meskipun ini terlampau idealis, tetapi tawaran pemikiran Bung Hatta tentang demokrasi yang diselaraskan nilai gotong royong sebagai spirit masyarakat Indonesia, niscaya keadilan yang menjadi cita-cita bersama itu akan tercapai. Atas dasar itu, keberadaan demokrasi harus memperhatikan antara aspirasi kehendak ideal dan pilihan-pilihan kebijakan.

Referensi:

- Sastroamidjojo, Ali. 1974. *Tonggak-Tonggak di Perjalananku*. Kinta: Jakarta. hal 174.
- <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/02/14/peningkatan-skor-indeks-demokrasi-2021-tak-serta-merta-tandai-perbaikan-kualitas-demokrasi-indonesia> diakses pada 20 Agustus 2022
- Hatta, Mohammad. 1966. *Demokrasi Kita*. Pustaka Antara: Jakarta, hal. 21

MENJAGA UANG RAKYAT ALA BUNG HATTA

Oleh: Janwan Tarigan

Kepergian Mohammad Hatta (bung Hatta) menyisakan rasa kehilangan mendalam bagi segenap rakyat Indonesia. Tepat pada tanggal 14 Maret 1980, 42 tahun silam, Bung Hatta meninggal di usianya ke-77 tahun. Ibu pertiwi kehilangan sosok Bapak Proklamator sekaligus Wakil Presiden Pertama Indonesia; sosok pemimpin jujur dan sederhana, serta pribadi yang selalu berdiri bersama rakyat telah berpulang.

Suasana haru tatkala kepergian bung Hatta itu dituliskan Iwan Fals dalam lirik lagu berjudul Bung Hatta: "Hujan air mata dari pelosok negeri, saat melepas engkau pergi, berjuta kepala tertunduk haru... Terbayang baktimu terbayang jasamu, terbayang jelas jiwa sederhanamu... Jujur lugu dan bijaksana, mengerti apa yang terlintas dalam jiwa rakyat Indonesia". Sepenggal lirik tersebut mencerminkan betapa bung Hatta sangat mencintai dan dicintai rakyat Indonesia. (Iwan Fals, 2021).

Semasa hidup, impian bung Hatta tidak sesederhana lakunya. Ia mencita-citakan kemerdekaan sejati, yaitu terwujudnya kemakmuran dan kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia. Baginya, makna kemerdekaan tidak semata lepas dari penjajahan, melainkan bagaimana agar bangsa Indonesia mampu mengisi kemerdekaan itu. Atas dasar itulah bung Hatta menggagas dan giat membangun ekonomi kerakyatan (Litbang Kompas, 2019: 2). Tujuannya agar tercipta persamaan dan kesetaraan politik dan ekonomi rakyat Indonesia. Secara tegas bung Hatta menyatakan bahwa demokrasi politik harus dijalankan berdampingan dengan demokrasi ekonomi yang berlandaskan perikemanusiaan dan keadilan sosial (M. Hatta, 1966: 24).

Sayangnya, praktik hari ini berbanding terbalik dengan cita-cita demokrasi ekonomi bung Hatta. Tampak dari lebarnya jurang kesenjangan sosial-ekonomi di Indonesia. Data Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan (TNPK) pada tahun 2019 menyebut "1 persen orang terkaya menguasai 50 persen aset nasional" (Egi Adyatama, 2019).

Betapa demokrasi yang sedang berlangsung sudah melenceng dari tujuan semula. Demokrasi kini dibajak-dikuasai segelintir elite penguasa. Kekuasaan diperalat untuk mengakumulasi kapital penguasa, akibatnya korupsi merajalela. Konsekuensi logisnya, korupsi akan melahirkan kesenjangan sosial-ekonomi. Bagaimana tidak, uang rakyat dan kekayaan alam Indonesia yang seharusnya digunakan bagi kepentingan rakyat justru ditilap demi kepentingan pribadi dan golongan.

Bung Hatta menyadari betul bahaya korupsi. Oleh karenanya ia begitu serius memberantas korupsi. Bung Hatta tak pernah berhenti melawan setiap penyimpangan kekuasaan, meskipun dengan menanggung resiko besar (Litbang Kompas, 2019: vi). Karena dengan melawan korupsi berarti membuka jalan keadilan ekonomi.

Menjaga Uang Rakyat

Kisah bung Hatta melawan korupsi tidak perlu diragukan lagi, segala daya upaya ditempuhnya. Ia tidak hanya berkata-kata tapi dibuktikan dengan perbuatan. Bung Hatta misalnya begitu berhati-hati dalam menggunakan uang rakyat, bahkan untuk urusan kesehatan sekalipun.

Ada cerita menarik sepulang bung Hatta berobat dari negeri Belanda pada tahun 1971. Saat ia mengembalikan dana sisa akomodasi pengobatan dan perjalanan ke Sekretariat Negara, karena menurut bung Hatta uang sisa itu tetap milik rakyat Indonesia sehingga harus dikembalikan. Padahal, peraturan saat itu mengamanatkan seluruh dana akomodasi yang sudah diberikan tersebut dianggap sah menjadi milik orang yang dibiayai dan tak perlu dikembalikan (Albin Sayyid Agnar, 2020). Begitulah ketatnya bung Hatta dalam menggunakan uang rakyat.

Kekinian, penggunaan uang rakyat oleh pemerintah semakin tidak karuan. Hampir setiap hari kita mendengar kabar korupsi uang rakyat atau anggaran publik (APBN dan APBD). Sejalan dengan itu, hasil penelitian Malang Corruption Watch pada tahun 2022 menunjukkan, bahwa dari 16 kasus korupsi kepala daerah di Jawa Timur sejak 2004–2021 selalu menyasar uang rakyat yang tertuang dalam APBD (MCW, 2022). Belum lagi secara berkelanjutan dan terang-terangan penggunaan anggaran publik paling banyak terkuras untuk kepentingan birokrasi. Data Kemenkeu tahun 2019–2021 memperlihatkan sebanyak 59 persen belanja daerah dihabiskan untuk belanja operasional birokrasi (Maryono, 2021). Dalam kondisi demikian tentu mencapai tujuan bernegara menjadi sangat sulit.

Peranan anggaran publik memang sangat strategis dalam pembangunan baik dalam konteks nasional maupun di daerah. Anggaran sebagai politik teknis kebijakan pemerintah dapat menggambarkan prioritas pembangunan yang dijalankan pemerintah. Anggaran juga bisa menjadi indikator kualitas demokrasi dalam kaca mata partisipasi sebagai roh demokrasi. Berkaitan dengan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan anggaran publik mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawabannya. Melihat realitas saat ini, anggaran publik masih dikelola secara tertutup dan seolah menjadi rahasia pemerintah. Minimnya partisipasi publik tersebut mencerminkan bahwa kebijakan anggaran belum mementingkan kebutuhan rakyat. Hal itu juga turut membuka ruang-ruang korupsi uang rakyat sebab lemahnya kontrol publik.

Oleh karenanya ke depan, demokratisasi anggaran publik sangat penting dilakukan. Pengelolaan anggaran publik haruslah partisipatif, agar setiap kebijakan pemerintah berdasar dan berasal dari rakyat (otonomi rakyat). Dengan demikian pembangunan dan pelayanan publik bisa tepat sasaran, pun akan menutup celah korupsi. Sepatutnya kita belajar dari bung Hatta perihal bagaimana memaknai dan menjaga uang rakyat.

Kini, saatnya kita, rakyat Indonesia, bergotong royong meneruskan perjuangan bung Hatta melawan korupsi. Jasad bung Hatta memang telah tiada, tapi warisan teladan dan gagasannya akan tetap hidup bersemai mengiringi perjalanan Republik. Merdeka!

Referensi:

- Hatta, Mohammad. 1966. Demokrasi Kita. Jakarta: Pustaka Antara PT.
- Litbang Kompas. 2019. Mohammad Hatta: Gagasan Koperasi Solusi Kemiskinan. Jakarta: Kompas.
- Litbang Kompas. 2019. Mohammad Hatta: Keteguhan Melawan Korupsi. Jakarta: Kompas.
- Tim Riset MCW. 2022. Telaah Modus Baru Korupsi Anggaran: Fenomena Temuan Berulang dalam LHP BPK Perwakilan Jawa Timur 2018-2020. Malang Corruption Watch.
- Egi Adyatama. Tempo.co. 2019. TNPk: 50 Persen Aset Nasional dikuasai 1 Persen Orang Kaya. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1257603/tnp2k-50-persen-aset-nasional-dikuasai-1-persen-orang-kaya> pada 23 Agustus 2022.
- Albin Sayyid Agnar. 2020. Mengenal Sosok Mohammad Hatta dari Sudut Pandang Ketiga Putrinya. Diakses dari https://www.gramedia.com/best-seller/mengenal-mohammad-hatta-dari-sudut-pandang-ketiga-putrinya/#2_Kejujuran_beliau_dalam_menggunakan_uang_negara_menurut_Gemala_Hatta pada tanggal 23 Agustus 2022.
- Maryono. 2021. Kata Menkeu, Anggaran Daerah Lebih Banyak Tersedot untuk Belanja Birokrasi. Diakses dari <https://infoanggaran.com/detail/kata-menkeu-anggaran-daerah-lebih-banyak-tersedot-untuk-belanja-birokrasi> pada tanggal 23 Agustus 2022.

HATTA: DEMONSTRAN "BERALMAMATER" SEJARAH

Oleh: Karunia Haganta

Mohammad Hatta, atau kerap disebut Bung Hatta, hidupnya jadi teladan, pemikirannya jadi acuan, sekian waktu berjalan, masih tidak kunjung lekang ditelan zaman. Hatta bukan epigon yang hanya mengulang-ulang pemikiran besar yang telah dipelajarinya. Melampaui itu, Hatta menyusun pemikirannya dalam setidaknya tiga ranah yang paling membesarkannya, Indonesia, Islam, dan Barat. Ketiganya ini dipelajarinya bukan sekadar sebagai pengetahuan, tetapi sebagai ilmu, yang sistematisasi di dalamnya Hatta pahami dan aplikasikan dalam ragam konteks yang dia hadapi. Di ranah pemikiran, Hatta menuliskan dari filsafat Yunani sampai tentang sistem ekonomi koperasi. Dia tidak segan memperdebatkan Marxisme bahkan dengan petinggi PKI (Partai Komunis Indonesia). Namun, segala bantahannya atas Marxisme ini menunjukkan bahwa dia adalah pembelajar yang amat tekun sampai menguasai paham yang bertentangan dengannya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa seluruh hidup Hatta adalah kritik. Dia mengkritik Marxisme dalam tulisannya, mengkritik oligarki dalam kehidupannya, dan mengkritik "kepahlawanan" melalui wasiat penguburannya.

Setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kritik-kritik Hatta, apapun bentuknya, terhadap kondisi Indonesia saat ini. Kritik memanglah penting. Dalam iklim negara yang demokratis, kritik harusnya tumbuh subur. Negara demokrasi bukan negara yang menjunjung harmonis dan nama baik dengan mempertaruhkan kebebasan untuk mengkritik. Hatta sangat mengerti hal ini. Salah satu kritik terbesarnya adalah tulisan berjudul "Demokrasi Kita" yang diarahkan langsung pada Soekarno dan membuat tulisan tersebut dibredel. Kritik yang bisa dilihat dari pemikiran dan kehidupan Hatta adalah bagaimana negara ini merontokkan nilai-nilai demokrasinya dengan membungkam kritik.

Dalam Lampau dan Datang (1956), pidatonya ketika mendapatkan gelar doctor honoris causa dari Universitas Gajah Mada, Hatta menyebut lima anasir demokrasi asli Indonesia: rapat, mufakat, tolong menolong atau gotong royong, hak protes, dan hak menyingkirkan diri dari kekuasaan raja. Hatta paham betul bahwa protes alih-alih merusak demokrasi dan ditunggangi kepentingan, adalah suatu anasir penting demokrasi. Ironisnya, sekarang ini, protes dianggap pembangkangan yang merusak demokrasi. Lihat sentimen pemerintah terhadap protes besar-besaran yang terjadi beberapa tahun ke belakang, dari Reformasi Dikorupsi, Tolak RKUHP, Tolak RUU KPK, dan Tolak Omnibus Law, semuanya dituduh merusak demokrasi, ditunggangi kepentingan yang berusaha merusak stabilitas negara, dan jalur gugatan ke MK seolah-olah jadi satu-satunya cara dalam negara yang demokratis ini. Padahal Hatta sendiri menyebut, "mufakat yang dipaksakan...tidaklah sesuai dengan paham demokrasi Indonesia."

Demonstrasi tersebut banyak diikuti mahasiswa. Bagi pemerintah yang korup dan oligarki, mahasiswa memprotes karena ditunggangi. Bagi Hatta, mereka memang harusnya protes. Kaum terpelajar, atau inteligensia, memiliki tanggung jawab intelektual dan moral. "Intelegensia Indonesia memiliki tanggung jawab intelektual untuk membela ide-ide dan nilai-nilai moral bangsanyaMereka yang melepas tanggung jawab ini demi nafsu politik berarti telah mengkhianati fungsi dan bangsa mereka," ujar Hatta dalam pidato di Universitas Indonesia, 11 Juni 1957, berjudul Tanggung Jawab Moral Kaum Inteligensia. Mereka protes bukan tanpa sebab, tetapi karena intelektualitas mereka menyadari mereka ada pelanggaran kedaulatan rakyat dan tanggung jawab mereka mencegah itu.

Demokrasi, menurut Hatta, bukan hanya demokrasi politik, "(d)isebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi." Protes tersebut muncul selain sebagai wujud perlawanan atas pengkhianatan demokrasi politik, tetapi juga menentang neoliberalisme yang merampas demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi yang dicontohkan Hatta adalah kolektivisme pengelolaan alat produksi, seperti lahan. Selain itu, Hatta "meramalkan" neoliberalisme dengan menyebut "(s)telsel bertanggung jawab sendiri di dalam ekonomi membawa akibat, bahwa hidup seorang buruh hanya terjamin selama ia kuat dan dapat bekerja. Ia terlempar dan terlantar, apabila ia sudah tua dan sakit-sakit dan tenaganya bekerja sudah lemah." Inilah yang diwujudkan oleh UU Cipta Kerja yang ditolak oleh segenap kaum inteligensia dan rakyat Indonesia dari berbagai elemen. Pasalnya, hukum ini mengancam hak-hak pekerja atas kerja yang layak. Posisi buruh menjadi lemah, karena fleksibilisasi tenaga kerja.

Fleksibilisasi kerja berjalan beriringan dengan fleksibilisasi pasar tenaga kerja. Fleksibilisasi pasar tenaga kerja memiliki empat dimensi, yakni fleksibilitas eksternal (fleksibilitas mempekerjakan buruh); fleksibilitas internal (fleksibel mengatur jam kerja pekerja); fleksibilitas fungsional (fleksibel mengatur pembagian kerja); dan fleksibilitas upah. Sebelum kerja digital, fleksibilisasi ini sudah terjadi dan bahkan didukung pula oleh IMF seperti tercatat pada LOI (Letter of Intent) IMF dan Indonesia yang mencantumkan fleksibilitas pasar tenaga kerja sebagai resep kebijakan. Di era digital, fleksibilitas ini makin masif, terutama dengan meningkatnya ekonomi platform dan ekonomi gig. Ekonomi gig nyaris identik dengan pekerja kontrak jangka pendek dan pekerja lepas. Ekonomi gig kerap disalahpahami sebagai ekonomi digital, meski definisi aslinya adalah pekerja dibayar berdasarkan produknya, bukan waktu kerjanya.

Oligarki dan abainya pemerintah atas protes rakyat merupakan pengkhianatan demokrasi politik dan ekonomi. Kini terlihat bahwa oligarki memperkaya diri dalam lindungan pemerintahan yang mengerahkan otoritasnya untuk memperlancar penindasan. Seandainya Hatta berkecimpung pada saat ini, sekitar 100 tahun setelah Zaman Bergerak yang ditandai pergerakan pemuda Indonesia, termasuk dirinya, mungkin Hatta akan menjadi bagian dari kaum inteligensia yang turun ke jalan, mengorganisasi mahasiswa dan masyarakat, melancarkan protes dan kritik keras nan tajam pada pemerintah, sebagai pemuda "beralmamater" sejarah yang telah mengajarkannya "menggambil pelajaran dari masa yang lampau untuk membangun masa datang."

HATTA DAN ANGAN ANTIKORUPSINYA

Oleh: Kurnia Ramadhana

“Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki”

Kalimat di atas mewarnai jagat dunia maya ketika dituliskan nama penting yang menjadi salah satu tonggak berdirinya Republik Indonesia, siapa lagi kalau bukan Mohammad Hatta. Sang Proklamator itu dikenal sebagai sosok pemimpin sederhana, berintegritas, dan yang paling utama adalah keberpihakannya pada isu pemberantasan korupsi. Sayangnya warisan dan teladan tersebut kian layu, bahkan terlupakan oleh pemimpin kekinian Indonesia.

Paradoks dengan keinginan Hatta, Indonesia semakin jauh dari negeri yang bebas dari korupsi. Betapa tidak, belakangan waktu terakhir republik ini mengalami stagnasi, bahkan kemunduran luar biasa dalam menabuh genderang perang melawan kejahatan kerah putih itu. Mudah sebenarnya untuk memvalidasinya, sebut saja Indeks Persepsi Korupsi yang dilansir oleh Transparency International. Kala itu skor Indonesia anjlok pada tahun 2020, dari 40 menjadi 37. Mirisnya penurunan itu justru terjadi di saat sepuluh tahun terakhir skor Indonesia selalu mengalami kemajuan. Ini sudah barang tentu merupakan pertanda bahwa pemberantasan korupsi sedang tidak baik-baik saja.

Belum lagi ditambah dengan nasib garda utama pemberantasan korupsi, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jamak dikenal masyarakat, salah satu lembaga penegak hukum itu terbilang berhasil menangkap para pencoleng uang rakyat. Namun, keberuntungan tidak berpihak pada mereka, lingkaran politik telah menggergaji segala kewenangan dengan mengubah pondasi regulasinya. Tak cukup itu, pemerintah dan DPR serentak satu suara memilih figur bermasalah menjadi pimpinan tertinggi lembaga antirasuah. Akibatnya sudah bisa ditebak, nilai penting yang kerap didengungkan Hatta berupa integritas pun luntur sejalan dengan pelanggaran etik dua orang Pimpinan KPK. Satu karena menunjukkan gaya hidup bermewah-mewahan, sedangkan satu orang lagi disinyalir menerima gratifikasi berupa tiket perhelatan Moto GP Mandalika serta segala fasilitas mentereng lainnya.

Seiring berjalan waktu, masyarakat mulai memahami bahwa pemberantasan korupsi berbelok arah. Alih-alih memberantasnya, para pemberantas korupsi justru diberantas. Konkretnya dapat dilihat dari pemecatan puluhan pegawai KPK yang dikenal memiliki rekam jejak baik melalui Tes Wawasan Kebangsaan. Para punggawa pemberantasan korupsi itu diberantas oleh atasannya sendiri dengan cara yang sulit diterima akal sehat. Berharap pada pemerintah dan DPR untuk mencegah hal itu terjadi pun hanya ilusi semata. Optimisme Hatta akan masa depan bangsa ini besar kemungkinan berubah menjadi rasa penyesalan yang mendalam.

Kisah Hatta pada tahun 1970 menarik untuk direfleksikan dengan kondisi saat ini. Hatta yang tak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden diajak oleh pejabat Departemen Penerangan untuk mengunjungi Papua. Singkat cerita, sesampainya di sana, Hatta disodorkan amplop berisi uang dari pemerintah untuk uang saku perjalanan. Menariknya, Hatta menolak dengan tegas pemberian itu dengan alasan yang semakin menguatkan nilai keteladannya, yakni, “Tidak, itu uang rakyat, saya tidak mau terima. Kembalikan.” Kata-kata Hatta itu sontak bertolak belakang dengan realita pejabat belakangan waktu terakhir. Satu contohnya ketika Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis penjara kepada mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik. Bisa dibayangkan, pejabat culas itu malah menggunakan Dana Operasional Menteri untuk kepentingan pribadinya. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya pun mencapai Rp 10,3 miliar.

Kisah kalam lain terjadi pada akhir tahun 2020. Saat itu KPK kembali meringkus pejabat teras pemerintah, yakni Menteri Sosial, Juliari P Batubara. Betapa bejatnya, saat masyarakat menghadapi pandemi Corona Virus Disease-19, Juliari justru meraup keuntungan luar biasa besar secara melawan hukum dengan menerima suap sebesar Rp 32 miliar dalam program pengadaan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak. Mirisnya, dana suap dari proyek bansos tersebut digunakan Juliari untuk menyewa jet pribadi saat mengadakan kunjungan ke beberapa daerah. Jadi, dua sosok koruptor itu jelas merupakan antitesis yang terang benderang dari figur seorang Hatta.

Perjalanan hidup Hatta memang selalu menarik diulas. Satu cerita yang mungkin seantero Indonesia sudah tahu adalah keinginannya memiliki sepatu dengan merk Bally. Namun, apa daya, hingga ajal menjemputnya, Wakil Presiden pertama itu tak juga mampu membelinya. Mari bandingkan dengan mantan Ketua DPR RI yang saat ini mendekam di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin, Setya Novanto. Dengan jabatan mentereng dan harta kekayaan yang sudah mencapai Rp 114 miliar, ternyata Novanto masih merasa kurang sehingga harus mengambil uang rakyat melalui proyek KTP Elektronik beberapa tahun lalu. Alhasil, puluhan juta masyarakat menanggung dampak perbuatannya. Sikap culas semacam ini tentu bukan yang pertama dan satu-satunya dilakukan pejabat di Indonesia.

Bagaimana Hatta tidak murung melihat bangsa ini, kualitas integritas pemangku kepentingannya saja penuh dengan persoalan. Jika dibagi menjadi empat klaster, berdasarkan data KPK, dari tahun 2004 sampai 2022 tak kurang 176 kepala daerah tersangkut korupsi, ditambah lagi dengan 310 orang anggota legislatif, 21 hakim, dan 26 aparat penegak hukum. Berbanding lurus dengan data itu, survei Global Corruption Barometer tahun 2020 juga menempatkan parlemen sebagai lembaga yang paling korup diikuti pejabat pemerintah, kepolisian, dan pengadilan. Jadi, sumber persoalan korupsi di Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dari hilangnya figur-figur teladan seperti Hatta pada posisi penting dan penentu kebijakan.

Satu-satunya cara menunaikan amanat Hatta memang mesti dimulai dari figur pemimpinnya, baik pada level daerah maupun pusat. Namun, selama ini janji untuk menegakkan sikap integritas, menjalani hidup sederhana, dan berpihak pada pemberantasan korupsi hanya sebatas narasi bualan saat masa kampanye. Akhirnya, rakyat harus menanggung semua akibat perbuatan para pelaku, satu diantaranya adalah hal yang amat dikhawatirkan Hatta, yakni kemiskinan.

Terakhir, dalam masa sulit seperti saat ini, rasanya mustahil berharap pada pemerintah untuk memaksimalkan upaya pemberantasan korupsi. Maka dari itu, masyarakat harus berperan aktif, tidak hanya berbuat sesuatu, namun juga mengingatkan pemangku kepentingan tatkala tali mandat mulai disalahgunakan. Ibarat ucapan Hatta “Hanya ada satu negara yang pantas menjadi negaraku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku.”

ASKETISME POLITIK HATTA

Oleh: Milki Amirus Sholeh

Berbicara soal ruang hidup Hatta, kita akan berhenti pada titik renung sosok administratur yang handal dan ideologis. Sebagai dwitunggal yang lahir dari arus pergulatan sejarah besar kebudayaan "Indonesia dalam" dengan bercorak pertanian beririgasi dipengaruhi langsung oleh semangat Hinduisme dan stimulus peradaban China, serta kebudayaan "Indonesia luar" dengan corak perdagangan pesisir yang secara kuat dipengaruhi Islam dan kemudian oleh stimulus pembaratan (Hildred Geertz, 1963). Dirinya membuktikan amanah dan kebanggaan menjadi manusia Indonesia.

Besar dalam pendidikan barat yang mengkultuskan individualisme dan liberalisme tidak lantas Hatta mengadopsi pikiran untuk mengeruk peruntungan lebih besar. Sebagai bapak proklamator, dia mungkin saja menaruh sikap permisif tanpa mesti menoleh agenda dan aktor lain pada momen kemerdekaan itu. Sebagai salah satu ekonom par-excellence dia mungkin saja menata administrasi dan pola keuangan negara yang berdiri itu dengan konstruk cara pandanganya saja.

Dalam pemahaman demokrasi yang dia letakkan berdasarkan tiga sumber gagasan, yaitu ajaran Islam, asas kekeluargaan dan kebersamaan, serta sosialisme Barat. Hatta melihat kebebasan harus dilepaslandaskan tetapi individualisme yang mengarah pada kehendak bebas untuk berbuat sesuka hati tidak diperkenankan. Politik sarat kepentingan pribadi hanya menyokong prinsip demokrasi berpolitik, tanpa demokrasi dan berkeadilan ekonomi.

Sejak remaja Hatta begitu menelaah sebuah ayat suci menyebutkan "Dia (Yusuf) berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (jujur) dan berpengetahuan" (Q.S:Yusuf:55). Bangsa yang baru berdiri tidak boleh diserahkan pada kelompok orang yang hanya dapat teriak, namun harus juga bisa mengelola. Pilihan itu terbilang aneh untuk sekelas bapak bangsa, namun justru alasan itulah yang membuat Hatta merawat penataan negara dengan baik dan transparan hingga dia dikenang. Sosok yang selalu berusaha tidak membuka identitas berlebihan dari fase-fase awal capaian kenegaraan. Dirinya memahami dengan baik nilai-nilai berdasarkan Islam inklusif, yang menitikberatkan pada kebenaran dan keadilan sosial. Tidak ada relasi kuasa total, yang ada adalah kekuatan rakyat yang tidak bisa dikalahkan ataupun dikamufleskan. Tidak boleh ada permainan di balik layar, kejelasan adalah sikap kebesaran mental pribadi. Hatta tidak pernah mentolerir siapapun, jabatan, bahkan rekannya sendiri.

Asketisme bagi Korupsi

Asketisme dalam politik biasa diwujudkan sistem kekuasaan yang lebih mengutamakan nilai-nilai kebudayaan dan peradaban di mana hukum menjadi panglima dalam membangun kebudayaan dan peradaban. Terjadilah aktualisasi nilai, etika, moral, dan penguatan etos tingkah laku yang tidak menghendaki merampas atau mengalihkan hak seseorang menjadi milik pribadi (Hatta, 2014). Sebagai wakil presiden pertama, dirinya dapat dianggap kesatria konstitusi yang berjiwa brahmana, resi, atau basah kuyup nilai-nilai profetik. Presiden bertanggung jawab secara etik dan moral membebaskan rakyat dari kemiskinan material dan kultural sekaligus meninggikan eksistensi rakyat menjadi bermartabat.

Walaupun sikap asketis Hatta terlihat dalam tangan dingin kerjanya, bukan berarti dirinya tidak berani bersikap. Kritik atas rekannya Presiden Soekarno yang dianggap telah menjadikan kekuasaan sebagai alat pribadinya, merupakan sikap kesatria dari bilik kursi kekuasaan langsung. Pendangkalan dan pemiskinan politik telah mendegradasi etika kekuasaan serta etika politik kekuasaan sehingga menyuburkan tindakan korupsi (Deliar, 2018).

Politik yang dijalankan dengan mekanisme pasar menggadaikan naluri bahwa politik adalah jalan satu-satunya manajerial organisasi "negara" agar dapat membuat pilihan keputusan atas masalahnya. Rente kuasa elite telah meletakkan pondasi yang tidak menempatkan rakyat sebagai subyek (people based) dan sebagai pusat dari kegiatan ekonomi (people centered) (Macridis & Brown, 1986). Dalam gebyar politik yang bertautan dengan kapitalisme pasar, elite ekonomi maupun politik tidak takut mengadakan kongsi secara transparan untuk menanamkan pengaruhnya.

BUAH PIKIRAN BUNG HATTA SEBAGAI ETOS KEHIDUPAN BERBANGSA

Oleh: Kierby

Buah Pikiran Berbangsa Bung Hatta: Demokrasi, Ekonomi, dan HAM

Di kesempatan kali ini, bertepatan di tanggal lahirnya Bung Hatta, 12 Agustus, mungkin dapat digunakan untuk menyelami gagasan dan pemikiran Bung Hatta dalam berbangsa terkait demokrasi, ekonomi, dan HAM sebagai refleksi terhadap keadaan Republik Indonesia hari ini. Buah pikirannya juga mengandung nilai yang dipegang oleh filsafat dunia saat ini terkait dengan krisis kemanusiaan dan lingkungan yang dihadapi masyarakat dunia, sehingga dapat menjadi nilai yang ditanam dalam jati diri warga negara sebagai etos kehidupan bangsa Indonesia.

Bung Hatta dikenal akan prinsip demokrasinya untuk kemerdekaan Indonesia. Jika melihat ke dalam sejarah, keteguhan hatinya terhadap prinsip demokrasi ditunjukkan saat ia menempatkan diri dalam posisi yang berseberangan dengan Bung Karno ketika masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966) yang dinilai otoriter dan menindas demokrasi. Menurutnya, ada tiga sumber pokok demokrasi yang mengakar di Indonesia. Pertama, sosialisme Barat yang berlandaskan kesetaraan dan kemanusiaan. Kedua, ajaran Islam dengan menerapkan visi etis agama untuk mencapai keadilan sosial sempurna yang dikehendaki langit atas bumi dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, asas gotong royong sebagai bentuk semangat kolektif yang terdapat di kehidupan desa-desa Indonesia.

Bung Hatta menilai jika hanya sosialisme Barat yang menjadi pangkal demokrasi, maka praktik demokrasi akan sama halnya seperti di Barat yang liberal dan individualis, serta tidak sesuai dengan wujud keadilan sosial yang sesuai dalam visi etis agama dan semangat gotong royong di kehidupan masyarakat Indonesia. Ia juga mengkritik demokrasi Barat yang hanya membatasi kedaulatan rakyat pada dimensi politik, namun tidak berdaulat penuh secara ekonomi. Maka, ia memilih gerakan koperasi rakyat sebagai demokrasi ekonomi dengan tujuan agar masyarakat memiliki roda keberlanjutan ekonomi (*sustainable economy*) yang dikelola oleh rakyat dan untuk rakyat tanpa dominasi sistem perekonomian kolonial Belanda.

Dasar pemikiran demokrasinya juga meliputi hak asasi manusia (HAM). Ini bisa dilihat kembali dalam sejarah saat ia tidak memaksakan Papua (Irian Barat) untuk bergabung dalam negara Republik Indonesia. Bung Hatta sangat menentang pemaksaan, termasuk menentang kata mufakat yang dipaksakan kepada rakyat yang jauh dari nilai kedaulatan. Hasil perjuangan Bung Hatta dalam memasukkan nilai HAM dalam UUD 1945 salah satunya yang tertulis di Pasal 28 yaitu, 'kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan'. Realisasi ini ditunjukkan dengan pengesahan Maklumat 3 November 1945 oleh Bung Hatta yang dianggap sebagai tonggak awal demokrasi Indonesia, di mana masyarakat dapat bebas membentuk partai politik namun akhirnya pengesahan ini dicabut pada tahun 1959 sebagai awal lahirnya Demokrasi Terpimpin.

Relevansi Gagasan Bung Hatta dengan Keadaan Indonesia Hari Ini

Buah pikirannya masih relevan sebagai solusi mengatasi keadaan Indonesia hari ini, karena gagasan keadilan sosialnya berpangkal pada kedaulatan rakyat yang nyatanya Indonesia hari ini jauh dari nilai tersebut. Ini dapat dilihat dari sistem politik pencalonan presiden dengan ketentuan syarat ambang batas (*presidential threshold*) 20%, yang pertama kali dirumuskan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wapres, di mana hanya partai ataupun koalisi partai yang memperoleh 20% dari suara sah nasional yang mendapatkan hak untuk mencalonkan Presiden. Padahal pemilihan capres artinya rakyat menyaring calon yang memiliki kapasitas dengan mencoret calon yang tidak memenuhi kapasitas, bukan sebaliknya dipaksa untuk memilih capres yang disediakan partai tanpa diuji kapasitasnya secara langsung oleh rakyat. Dampaknya saat ini Indonesia seolah-olah mengindahkan demokrasi, namun nyatanya demokrasi semakin hambar. 'Bagaikan setetes gincu merah yang diaduk dalam air, hanya warna yang berubah tetapi hambar rasanya.'

Jika ditelusuri lebih jauh ke dalam struktur sosio-ekonomi masyarakat Indonesia, struktur sosio-ekonomi hari ini adalah warisan dari pemerintahan kolonialisme. Ini dilihat dari tujuan ekonominya yang menitikberatkan pada akumulasi surplus semata, dan bukan digunakan sebagai alat penyelenggara kemakmuran rakyat; seperti pemenuhan penghidupan (*subsistence needs*) dan distribusi ekonomi yang adil sesuai cita-cita Bung Hatta. Dalam kutipan buku *Ecofeminism* karya V. Shiva dan Maria Mies, diterangkan bahwa struktur sosio-ekonomi negara eks-kolonial telah membentuk tatanan masyarakat konsumen-produsen, yang memberi dampak buruk bagi kemanusiaan dan lingkungan karena konsep ini hanya menitikberatkan pada penawaran dan permintaan (*supply and demand*), dan melihat manusia sebagai pasar serta lingkungan hanya sebagai penyedia sumber daya yang dapat dieksploitasi demi surplus. Warisan sistem ekonomi dari eks-kolonial ini hanya hanya mementingkan surplus dari nilai-tukar yang berpotensi memperdaya sesama saudara sebangsa dan eksploitasi lingkungan.

Buah pikiran Bung Hatta dan filsafat ekofeminisme sama-sama memiliki hubungan pada nilai pemenuhan penghidupan (*subsistence*) dalam sosial masyarakat tanpa di dominasi kekuatan institusi. Secara garis besar ekofeminisme mengkritik perkembangan sains modern (IPTEK) yang mendominasi alam dan perempuan, sehingga solusi atas permasalahan ini adalah mengembalikan perspektif pemenuhan penghidupan (*subsistence perspective*) serta merawat budaya daerah agar dapat menciptakan komunitas mandiri yang keberlanjutan (*self-sustainable communities*) berdasarkan kepedulian atas lingkungan hidup. Nilai ini juga yang diangkat Bung Hatta dengan menitikberatkan pada pemenuhan penghidupan (*subsistence needs*) lewat koperasi rakyat dan demokrasi desa untuk merawat keberlanjutan hidup desa dan masyarakatnya dengan mandiri.

Krisis kemanusiaan dan isu HAM saat ini juga menjadi perhatian warga negara; baik di dunia ataupun Indonesia, salah satunya akibat dampak konflik dan perang Rusia-Ukraina. Peperangan dunia tentu mempengaruhi roda ekonomi negara yang tidak memiliki nilai keberlanjutan atau tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya sendiri, dan untuk mengatasinya ternyata Bung Hatta sudah menanamkan nilai ini ke dalam gagasan berbangsanya, yaitu kedaulatan rakyat dengan demokrasi ekonomi untuk mencapai keadilan sosial.

Sedangkan di dalam negeri, jika kembali ke sejarah, HAM bukan hanya dibatasi, tetapi juga dilanggar oleh pemangku kekuasaan; baik sejak Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi saat ini demi mencapai kepentingan atau mempertahankan kekuasaan. Buah pikiran Bung Hatta tentang bangsa sepatutnya dirawat dan ditanamkan dalam pendidikan berwarganegara untuk membentuk jati diri dan etos bangsa Indonesia yang berintelektualitas dan berintegritas, terutama di era globalisasi.

DEGRADASI MORAL DI TUBUH POLRI (KASUS FERDY SAMBO DAN KONTRADIKSINYA DENGAN NILAI HIDUP BUNG HATTA)

Oleh: Maria Goreti Ana Kaka

Belakangan ini, kasus pembunuhan Brigadir Josua Hutabarat (Brigadir J) yang melibatkan Ferdy Sambo (mantan Kadiv Propam POLRI) bersama puluhan personil kepolisian—tentu saja menyita perhatian publik. Bagaimana tidak, banyak kejanggalan berikut fakta-fakta baru tentang kejahatan anggota polisi muncul ke permukaan. Terlepas dari motif pembunuhan ini apakah terkait skandal, kepentingan politik atau urusan bisnis, kasus yang direkayasa dan disebarakan tanpa rasa malu oleh para penegak hukum ini juga membuat publik tak sungkan menilai jika terjadi degradasi moral di tubuh POLRI.

Mari kembali mengingat kasus-kasus yang melibatkan para aparat kepolisian. Mulai dari kasus Cicak vs Buaya (Jilid I - Jilid III), kasus penghapusan Red Notice Djoko Tjandra, kepemilikan bisnis ilegal (tambang, narkoba, dan baju bekas) oleh Briptu HSB, penimbunan BBM dan illegal logging oleh Aiptu Labora Sitorus, polisi banting mahasiswa saat demo, polisi yang memanfaatkan mobil patroli untuk pacaran, polisi yang merepresi masyarakat adat, polisi pelaku kekerasan seksual, hingga polisi yang mengabaikan laporan terkait kasus kekerasan seksual.

Bukankah deretan kasus di atas terlalu sederhana jika pelakunya disebut oknum saja? Iya, tidak dimungkiri kalau masih ada aparat polisi yang berintegritas. Namun, bagaimana jika setiap hari atau setiap minggu ada satu/dua oknum yang bermasalah? Bagaimana jika ada oknum-oknum yang membentuk komplotan hanya demi memperjuangkan kepentingan diri dan golongan?

Buntut dari kasus demi kasus yang melibatkan anggota polisi membuat citra positif POLRI menurun. Berdasarkan hasil survei LitBang Kompas, citra positif kepolisian anjlok hingga 65,7% per Juni 2022. POLRI tentunya tidak menjadi satu-satunya lembaga yang sarat akan konflik.

Banyak lembaga negara yang juga bermasalah. Mengingat kasus Ferdy Sambo yang seolah membuka kotak pandora di Korps Bhayangkara, tidaklah keliru jika kita sebagai warga negara ikut menyuarakan kritik. Kepolisian yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, justru anggotanya menjadi biang kerok kriminalitas itu sendiri. Lantas, di mana harga diri POLRI sebagai lembaga penegak hukum? Bukankah POLRI memiliki slogan PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) yang mengandung nilai hidup Bung Hatta?

Di tengah rentetan drama kasus Ferdy Sambo, mari coba menengok ke belakang, belajar dari keteladanan Bung Hatta. Ferdy Sambo sebagai seorang pejabat utama di POLRI dan sejumlah personil polisi yang terlibat dalam kasus ini telah menunjukkan perilaku yang melanggar hak asasi manusia, mencederai demokrasi, dan koruptif. Tidaklah berlebihan jika kita mengatakan bahwa Ferdy Sambo adalah kontradiksi Bung Hatta. Mengapa demikian? Mari kita bahas satu per satu.

1) HAM

Apa pun motif pembunuhan terhadap Brigadir J, tentunya tindakan mengambil nyawa orang lain tidak dapat dibenarkan. Polisi saja tidak ragu-ragu membunuh sesama polisi, apa kabar rakyat yang selama ini menjadi korban tindakan represif para aparat? Jika kita menelisik lagi, Bung Hatta dengan tegas menentang kekerasan sebab bertentangan dengan nilai-nilai dasar HAM. Siapa pun yang melanggar atau menormalisasi kekerasan, perlu dipertanyakan lagi sisi kemanusiaannya.

2) Demokrasi

Secara konseptual, tataran demokrasi tidak melulu soal pemungutan suara. Penghormatan terhadap HAM, akuntabilitas, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap hukum adalah nilai-nilai dasar dalam demokrasi. Dalam kasus Ferdy Sambo, banyak anggota kepolisian yang ikut merekayasa kasus dan menggiring opini publik dengan berbagai upaya untuk menutupi fakta di balik tewasnya Brigadir J. Pihak kepolisian juga bahkan enggan terbuka soal motif pembunuhan Brigadir J. Ini menunjukkan bahwa nilai akuntabilitas, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap hukum tidak direalisasikan di sini. Jika saat ini Bung Hatta masih hidup, mungkin ia akan menjadi salah satu sosok yang berteriak kencang menuntut transparansi dari kepolisian. Sebab, semasa hidupnya, ia tidak segan-segan untuk menegur pejabat negara yang dianggap menyeleweng dari prinsip dan nilai demokrasi.

3) Antikorupsi

Ferdy Sambo yang memanfaatkan kekuasaannya untuk merekayasa kasus, menghilangkan barang bukti, mengintimidasi keluarga korban, dan berupaya menyuap LPSK adalah contoh perilaku korup. Semua itu dilakukan oleh Ferdy Sambo secara sadar, tahu, dan mau untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Jelas-jelas itu bagian dari korupsi. Belajar dari Bung Hatta, dalam kesederhanaannya, ia tidak pernah menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri dan keluarga. Bahkan ia masih menyicil untuk membayar air PAM. Bukan tidak mudah bagi seorang Wakil Presiden di masa itu untuk mendapatkan fasilitas mewah jika saja ia mau. Malu rasanya jika pejabat atau aparat penegak hukum tak bisa menjaga integritas diri.

Bagaimana mungkin meminta rakyat untuk taat terhadap hukum, hidup sebagai warga yang antikorupsi, dan berpartisipasi aktif merawat demokrasi jika aparat penegak hukumnya saja belum mampu menjadi teladan? Belum terlambat bagi POLRI untuk berbenah diri. Belum terlambat bagi aparat kepolisian untuk belajar menghayati dan mengimplementasikan nilai-nilai hidup Bung Hatta dalam memperjuangkan demokrasi, HAM, dan antikorupsi.

Semoga slogan PRESISI tidak hanya sekadar jargon lalu semakin terdegradasi menjadi 'SamBo' alias 'Sama-sama Boong'. Semoga tidak ada lagi Sambo-Sambo berikutnya. Bravo, POLRI!

HATTA TENTANG DEMOKRASI DAN BAGI-BAGI KURSI

Oleh: Muhammad Naufal

Situasi politik tengah memanas, demokrasi terancam, otoritarianisme tengah ugul-ugalan. Partai besar sekelas Masyumi dan PSI dipaksa bertekuk lutut dihadapan sang paduka, begitu pula kantor berita yang dipaksa membenamkan tulisan-tulisan kritisnya tentang kekuasaan. Tidak terelakkan, badan konstituante, lembaga yang diamanahi rakyat melalui pemilu 1955 untuk membentuk konstitusi baru juga turut dihajar habis, dibubarkan. Semua itu bermula saat dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diteken yang menjadi tonggak perubahan drastis kondisi Indonesia. Sukarno, menjelma menjadi seorang diktator.

Melihat kondisi yang memprihatinkan ini, Dwi Tunggal proklamator Indonesia berada di persimpangan jalan. Hatta dan Sukarno terpaksa harus berpisah di tengah jalan lantaran berbeda paham. Hatta, melalui pamflet yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1960 di majalah *Pandji Masyarakat* besutan pentolan Masyumi, Buya Hamka terbilang 'nekat' mengkritik kawan seperjuangannya itu. Melalui pamflet bersambung yang berjudul "Demokrasi Kita" tersebut, Hatta secara khusus menyoroti tindakan-tindakan Presiden Sukarno yang kala itu dianggap olehnya menyimpang.

Pertama, Hatta menyoroti tindakan Sukarno membubarkan badan konstituante hasil pemilu 1955. Tidak tanggung-tanggung, Hatta dengan tegas dan berani menuding Sukarno telah melakukan tindakan inkonstitusional dan kudeta. "Sungguhpun tindakan Presiden itu bertentangan dengan Konstitusi dan merupakan suatu coup d'etat," (Hatta, 1960). Kendati keduanya memilih jalan yang berbeda, tetapi menurut kesaksian Mochtar Lubis dalam *Bung Hatta: Pribadinya Dalam Kenangan* (1981, 580), Hatta sendiri tidak pernah melontarkan pernyataan yang buruk tentang Sukarno.

Secara terpisah, Hatta bahkan menggambarkan Sukarno sebagai antitesis dari Mephistopheles dalam hikayat Goethe's *Faust* yang mengatakan, bahwa dia merupakan energi yang menghendaki yang buruk dan selalu menghasilkan yang baik dan menurut Hatta, Sukarno adalah kebalikannya, tujuannya selalu baik tetapi jalan yang diambilnya kerap kali menjauhkannya dari tujuan tersebut (Hatta, 1960).

Ramalan Demokrasi Hatta

Dalam pandangannya, Hatta menganggap bahwa demokrasi Indonesia kala itu tidaklah lenyap, melainkan hanya tersingkir sementara saja. Lebih dalam, Hatta optimistis demokrasi akan kembali dengan gagah ke tanah air.

Bertalian dengan pernyataannya tersebut, Hatta melontarkan dua argumen. Pertama, cita-cita demokrasi telah hidup dalam pergerakan kebangsaan di masa penjajahan yang turut memberikan semangat kepada perjuangan kemerdekaan. Kedua, Hatta menuturkan bahwa, pada dasarnya pergaulan hidup Indonesia yang adil tentang demokrasi itu masih hidup dalam praktek kehidupan di desa-desa di Indonesia.

Praktek Bagi-Bagi Kue

Dalam "Demokrasi Kita," Hatta juga menyoroti posisi jabatan publik yang kerap diisi berdasarkan keanggotaan partai politik dan bukan berdasarkan keahlian. "Juga dalam penempatan pegawai di jabatan publik di dalam dan luar negeri, orang lupa akan dasar tanggung jawab dan toleransi dalam demokrasi. Seringkali keanggotaan partai menjadi ukuran, bukan berdasarkan prinsip *the right man in the right place*. Pegawai yang tidak berpartai atau partainya duduk di bangku oposisi merasa kehilangan pegangan dan patah hati" (Hatta, 1960).

Mirisnya, jika kita merefleksikan keresahan Hatta bertahun-tahun silam ini masih terjadi di Indonesia, kursi-kursi menteri, komisaris, dan berbagai jabatan publik hari ini didasarkan pada kedekatan dan seakan-akan menjadi ajang "Bagi-bagi kue" penguasa. Secara spesifik, kursi menteri yang secara konstitusional bertugas sebagai pembantu presiden, turut menjadi posisi yang diobral oleh partai-partai politik. Khususnya, bagi partai politik koalisi. Padahal, jika kita berkaca dari praktek sistem pemerintahan Presidensial, maka penentuan kursi menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Tetapi, dalam posisi di Indonesia hari ini, Presiden justru seakan tersandera oleh partai politik yang ada di belakangnya.

Contoh, sepeninggalan Tjahjo Kumolo selaku Menpan-RB, partai-partai politik ramai dengan kekosongan kursi tersebut, dan dengan gagahnya PDI-P selaku partai mendiang Tjahjo Kumolo mengklaim bahwa, kursi tersebut merupakan milik PDI-P. Padahal, sebagaimana yang telah penulis sampaikan di awal, bahwa penentuan kursi menteri merupakan hak prerogatif presiden. Dalam konteks ini, terlihat dengan jelas betapa cemerlangnya pemikiran Hatta kala itu, yang sayangnya keresahannya ini masih terjadi hingga hari ini. Artinya, pemikiran Hatta ihwal praktek bagi-bagi kue ini masih sangatlah relevan hingga hari ini. Kedepannya, pemikiran Hatta ihwal hal tersebut tentu dapatlah dijadikan panduan bagi penguasa untuk mengisi jabatan publik dengan orang-orang yang memang kompeten di bidangnya.

BUNG HATTA DEMOKRASI, HAM, DAN ANTIKORUPSI

Oleh: Muhammad Sayyid Hanafi

Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta atau yang akrab disapa Bung Hatta merupakan sosok yang lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bung Hatta merupakan anak kedua dari pasangan Muhammad Djamil dan Siti Saleha. Menempuh pendidikan di Europeese Lagere School dan lulus tahun 1916. Kemudian melanjutkan pendidikan di Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs Padang dan lulus pada tahun 1919. Setelah itu melanjutkan pendidikan di Prins Hendrik School lulus pada 1921 dan menyelesaikan kuliah di Handels Hoogere School di jurusan ekonomi kenegaraan pada tahun 1932 menjadikan beliau memiliki ilmu dan wawasan yang luas (Maryono, 2015: 24).

Hal itulah yang menjadikan Bung Hatta menjadi seorang yang memiliki pemikiran cemerlang, berintelektual, multitalenta, kharismatik, namun tetap sederhana. Kiprah Bung Hatta sebagai seorang abdi negara memiliki andil dan kontribusi besar bagi perkembangan bangsa Indonesia tidak dapat diragukan lagi. Mulai dari pemimpin organisasi pergerakan, proklamator, wakil presiden, maupun juga perdana menteri. Menjadikan banyak pemikiran beliau yang menjadi dasar dan acuan bagi periode selanjutnya.

Bung Hatta merupakan salah satu perintis sekaligus pelopor konsep hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Beliau telah menyumbangkan suatu pemikiran terkait HAM ini yang tertuang di dalam naskah pembelaan dengan judul "Indonesia Vrij" yang ditulis pada tahun 1928. Naskah tersebut ditulis menggunakan Bahasa Belanda dan terdiri dari 94 halaman. Di dalam naskah pembelaan tersebut Bung Hatta menulis berbagai hal terkait HAM dan mengkritik segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penindasan yang telah memperhinakan bangsa Indonesia. Beliau juga menyuarakan terkait kemerdekaan Indonesia, menggugat kekejaman pemerintah kolonial Belanda kepada rakyat Indonesia. Menyuarakan tentang keadilan tanpa kezaliman dengan berkehidupan yang bebas tanpa kekangan dan kesukaran. Penulisan naskah ini dilakukan Bung Hatta sewaktu di penjara sebagai akibat tuduhan Belanda yang menganggap Bung Hatta sebagai seorang komunis. Selain itu Bung Hatta juga dituduh sebagai penghasut rakyat untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah (Maryono, 2015: 24-25).

Bidang lain yang menjadi fokus garapan Bung Hatta adalah demokrasi. Demokrasi secara umum dapat dimaknai sebagai serangkaian tata aturan yang telah disepakati yang membahas mengenai masalah pemerintahan yang digunakan demi kepentingan rakyat secara kolektif. Demokrasi erat kaitannya dengan Bung Hatta. Hal ini dikarenakan Bung Hatta merupakan sosok sosialis yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi (Levia dkk, 2018: 30-38). Beliau dinilai sebagai salah satu tokoh pelopor demokrasi. Terlebih Bung Hatta juga menghendaki terciptanya praktik pemerintahan yang demokratis konstitusional. Hal tersebut menempatkan negara sebagai pelayan rakyat, yang mendorong negara untuk memberikan fasilitas bagi rakyat untuk dapat merasakan dan menikmati hak yang dimilikinya.

Secara umum Bung Hatta memiliki sudut pandang yang menempatkan kedaulatan rakyat pada posisi yang utama. Maka, menurut beliau jangan sekali-kali merendahkan atau bahkan meremehkan kedaulatan rakyat, maupun juga melawan suara hati nurani rakyat. Melalui maklumat yang ditandatangani beliau pada tanggal 3 November 1945 yang mana menyerukan pembentukan partai politik. Hal ini menandai berakhirnya negara Indonesia sebagai negara berpartai tunggal.

Momentum ini dilandasi asumsi Bung Hatta yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia memerlukan partisipasi dari berbagai golongan masyarakat luas. Selain itu Bung Hatta juga berpandangan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk, maka melalui kemajemukan politik yang hendak dibangun ini akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bersatu dalam kebhinekaan (Maryono, 2015: 34).

Bung Hatta dalam masa jabatannya sebagai abdi negara menekankan pada pengimplementasian pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang mampu membawa kebaikan bagi masyarakat. Pemerintahan yang transparan, pemerintahan yang mengedepankan akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat umum. Oleh karena itu, sosok Bung Hatta adalah sosok pejabat yang didambakan masyarakat, terlebih Bung Hatta adalah bapak bangsa yang penuh kejujuran dan kesederhanaan.

Dua karakter yang menjadi dasar atau fondasi penting di dalam menanamkan jiwa anti korupsi. Karena kejujuran dan juga kesederhanaan yang dimiliki Bung Hatta tidak bergelimang harta maupun kemewahan. Bahkan untuk membeli sepatu yang diinginkannya pun beliau tidak mampu membelinya, sampai akhir hayatnya. Padahal bila dilihat Bung Hatta merupakan pejabat negara, maka bukan perkara sulit untuk mendapatkannya. Namun itu bukanlah sosok Bung Hatta yang memanfaatkan jabatan yang diembannya demi kepentingan pribadi. Inilah jiwa-jiwa yang dibutuhkan penerus bangsa Indonesia kedepannya, jiwa yang lurus dan tidak bisa dibengkokan terkait kejujuran.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang majemuk dengan berbagai perbedaannya. Telah dicontohkan oleh Bung Hatta meskipun kita berbeda namun kita memiliki hak dan suara yang sama dalam masyarakat. Segala perbedaan yang ada hanyalah ujian dan cobaan untuk menguji seberapa kuat solidaritas kita sebagai bangsa Indonesia. Kita harus bisa menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada. Melakukan pemenuhan terhadap setiap kewajiban yang ada untuk mendapatkan hak yang kita miliki.

Penanaman dan pembiasaan pada diri sejak dini adalah kunci untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jangan melihat dimana kita berada karena Bung Hatta telah membuktikannya, meskipun dibalik jeruji besi penjara, namun masih bisa berkarya yang mampu mengguncang dunia. Berbekal kejujuran dan juga kesederhanaan sebagai dasar dan fondasinya. Gunakan pengalaman dan pembelajaran yang baik di masa lalu untuk membangun peradaban yang lebih baik di masa depan.

Referensi:

- Levia, Dkk. 2018. Kajian Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Demokrasi Di Indonesia. Jurnal Civicus, 18(12): 30-38.
- Maryono. 2015. Bung Hatta, Proklamator, Ilmuwan, Penulis Dan Karya-Karyanya: Sebuah Analisis Bio-Bibliometrik. Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi, 11(2): 24-35.

SULUH KETELADANAN BUNG HATTA

Oleh: Nanang Suryana

Tahun 2022, Indonesia merayakan hari kemerdekaannya yang ke-77. Usia yang sama dengan Bung Hatta, ketika Tuhan memanggilnya pada Jumat, 14 Maret 1980. Hatta memang telah tiada, namun, semangatnya akan terus menyala: kini, esok, dan seterusnya.

Sepeninggalnya 42 tahun yang lalu, Hatta mewariskan banyak hal. Namun, keteladanan, adalah warisan paling berharga yang ditinggalkannya untuk republik. Terlebih di tengah situasi seperti sekarang, dimana kita semakin sulit menemukan contoh perilaku elite yang senafas dengan kompas etika publik, kita benar-benar merindukan sosok seperti Hatta. Sosok sederhana, yang konsisten dan setia pada nilai-nilai yang diyakininya. Sosok yang mengajarkan bangsanya, betapa penting menjaga keselarasan antara ucapan dan tindakan.

Dalam rangka merefleksikan ulang arti kemerdekaan, mari sejenak kita kembali ke Hatta. Kita kunjungi kembali relung-relung pikiran dan gagasan yang pernah dilahirkannya. Sebagai bekal bagi generasi muda, dalam mengemban tugas merawat Indonesia merdeka, yang kelahirannya turut dibidani Hatta.

Hatta & Politik

Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi. Namun, Hatta juga adalah Bapak Demokrasi. Hatta yang meletakkan fondasi dasar demokrasi Indonesia. Desain multi partai yang kini dipraktikkan, adalah salah satu warisan politik Hatta yang masih hidup. Gagasan sistem multi partai lahir dari pikiran Hatta yang tegas menolak monopoli. Hatta tak setuju dengan absolutisme.

Bagi Hatta, politik sejatinya adalah jalan mengabdikan pada kemanusiaan. Karenanya, tidak boleh ada kepemimpinan yang absolut. Politik adalah ruang bagi keberagaman. Melalui medium partai politik, ekspresi kewargaan harus diberi ruang.

Sikap Hatta tersebut berseberangan dengan jalan politik Bung Karno. Sang presiden lebih menghendaki satu sistem politik yang berpusat pada dirinya. Namun, Hatta berpikir berbeda. Politik bagi Hatta sebaiknya dibiarkan hidup secara organik. Tidak terpusat hanya pada satu kekuatan.

Di tengah titik puncak perbedaan pandangan, alih-alih memilih berkonfrontasi secara terbuka, Hatta memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wapres. Selain karena Hatta menilai posisinya sudah kian tidak relevan dalam desain parlementer kala itu, Hatta juga berusaha untuk memberi panggung yang lebih besar bagi kawan seperjuangannya, Soekarno. Banyak yang menduga, Hatta pergi dengan membawa dendam. Padahal, tidak ada yang personal bagi Hatta. Dia hanya undur diri dari kekuasaan. Tidak dari pertemanan.

Kisah tanggalnya dwi tunggal pada akhir 1956 tersebut, dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Kendati Hatta dan Soekarno kerap terlibat dalam perbedaan pandangan, namun di luar semua itu, secara pribadi, mereka sama-sama menaruh hormat. Tidak ada dendam diantara keduanya. Bahkan, ketika Bung Karno berhalangan menjadi wali pernikahan puteranya, Guntur Soekarnoputra, Hatta bersedia untuk menggantikan.

Dewasa ini, ketika kita dihadapkan pada situasi dimana politik bisa menjadi sangat personal, keinsyafan yang diperlihatkan Hatta menjadi sangat penting untuk diingat dan ditiru. Politik sebaiknya tidak masuk terlalu jauh hingga ke jantung perasaan. Politik harus diletakkan di muka rumah hanya sebagai urusan publik. Sehingga, politik tidak akan mengambil terlalu besar ruang kebatinan kita sebagai individu.

Pada isu HAM, komitmen Hatta juga sangat terlihat. Demokrasi pada prinsipnya tak semata hanya soal majority rules, namun juga minority right. Peristiwa dihapuskannya tujuh kata dalam Piagam Jakarta, dimana Hatta berperan penting dalam momentum tersebut, merupakan contoh yang dapat menggambarkan keberpihakan Hatta pada isu keberagaman.

Di tengah padang gurun politik, Hatta tampil bak oase. Terlebih di era sekarang, dimana praktik koruptif kian melembaga dan tak jarang mendapatkan legitimasi sosialnya, kembali pada Hatta, menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan. Kita harus kembali pada keteguhan sikap, untuk mengatakan tidak, pada bentuk korupsi model apapun.

Hatta & Keadilan Sosial

Selain demokrasi, tema keadilan sosial, adalah tema lain yang cukup nampak dalam banyak karya Hatta. Semua gagasan dan pikiran Hatta, bermuara pada ide ini. Jika dirunut dari jalan hidupnya, gagasan ini rupanya berjangkar pada dua pertemuan tradisi yang sama-sama kuat: pendidikan keislaman yang mengakar, dan paparan inklusivitas pendidikan barat yang diterima Hatta ketika muda. Gagasan Hatta soal keadilan sosial, mewujudkan melalui ide ekonomi gotong royong dalam bentuk koperasi. Bagi Hatta, demokrasi Indonesia yang disebutnya sebagai 'demokrasi kita', adalah sebuah sistem politik yang harus memiliki titik kesetimbangan antara kebebasan dan kesejahteraan.

Berbekal pengalaman dan pengembaraannya di Eropa, Hatta juga meyakini, pada aras ekonomi, negara harus hadir guna memastikan kompetisi dapat berjalan dengan adil dan seimbang. Negara bukan hanya 'penjaga malam' yang pasif. Negara harus menjadi regulator yang aktif dalam memastikan keberimbangan persaingan diantara warga bangsa.

Sebagaimana dibayangkan Hatta, keadilan sosial sejatinya harus menjadi perhatian utama negara. Politik kesejahteraan kita harus berorientasi guna memutus jurang ketimpangan yang semakin tajam diantara sesama anak bangsa. Jika tidak, situasi ini dapat berubah menjadi ancaman nyata bagi kehidupan sosial kebangsaan kita ke depan. Ketimpangan akan menjadi momok yang dapat mengoyak persatuan kebangsaan kita.

Hatta sudah mewariskan banyak hal. Tugas kita untuk terus merawat, menjaga, dan meneruskan cita-citanya: mewujudkan Indonesia yang mampu memberi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tabik.

KEJUJURAN KAMI MELARANG KAMI JADI PENAKUT!

Oleh: Nazirwan Rohmadi

Korupsi termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Berita terbaru memberikan informasi bahwa Rektor Universitas Negeri Lampung ditangkap oleh KPK karena dugaan atas kasus penyuapan di proses Seleksi Mandiri Masuk Universitas Negeri Lampung. Peristiwa ini menggambarkan bahwa kasus korupsi telah masuk ke sendi utama dalam mencetak generasi baru yaitu pendidikan.

Patut diingat bahwa tersangka bukanlah orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah dan seharusnya sangat mengerti bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan tidak bermoral, terlebih hal itu dilakukan di dalam sektor pendidikan. Tindakan yang dilakukan oleh Rektor UNILA pasti memiliki faktor pendorong, karena korupsi bukanlah sebuah kegiatan yang dilakukan hanya karena seseorang kekurangan dalam hal pendapatan,. Tetapi korupsi dapat terjadi karena adanya tiga faktor utama yaitu sistem pengawasan yang lemah, adanya hasrat pelaku untuk memenuhi gaya hidupnya, dan kesempatan yang ada serta penyalahgunaan kekuasaan.

Faktor pertama, sistem pengawasan yang lemah salah satunya dapat terjadi di tingkat perguruan tinggi. Menurut Yuniar (2018), kasus korupsi di dalam lembaga pengurus intra kampus terjadi karena tidak adanya itikad untuk mewujudkan transparansi laporan keuangan, meskipun dana yang digunakan masih tersisa. Hal itu juga didukung oleh sistem pengawasan keuangan yang lemah sehingga memberikan celah.

Faktor kedua, gaya hidup merupakan salah satu hasrat yang muncul dari dalam diri manusia untuk memenuhi kepuasan batinnya. Hal itu dapat diwujudkan dengan cara membeli berbagai macam barang atau berlibur. Banyak hal yang dapat kita ambil pelajaran terkait nilai-nilai kehidupan yang diajarkan oleh Bung Hatta. Salah satu peristiwa yang dapat kita ambil pelajaran adalah ketika Bung Hatta menginginkan sebuah sepatu pantofel akan tetapi tidak dapat dimiliki oleh Bung Hatta hingga akhir hidupnya. Bung Hatta tidak dapat memilikinya karena setiap kali beliau memiliki uang, ada saja sanak keluarga atau kerabat yang meminjamnya karena adanya kebutuhan. Tentu seharusnya, seorang Wakil Presiden dengan mudah memiliki sepatu itu, tetapi Bung Hatta tidak pernah ingin menggunakan uang negara untuk memenuhi hasratnya. Perilaku seperti Bung Hatta dewasa ini sangat sulit untuk ditemukan dalam diri pejabat negara.

Faktor ketiga, kesempatan yang ada dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi terwujud penyalahgunaan sumber daya kekuasaan seperti fasilitas maupun perangkatnya berdasarkan kekuasaan yang melekat pada dirinya agar kepentingan pribadinya, keluarganya, dan golongannya dipenuhi (Setiyono, 2017:28). Contoh kasus yang sesuai dengan faktor ini adalah kasus yang melibatkan mantan Wakil Ketua KPK yaitu Lili Pintauli terkait dengan dugaan gratifikasi tiket MotoGP Mandalika. Mantan Wakil Ketua KPK tersebut diduga mendapatkan tiket serta fasilitas mewah yang diberikan oleh salah satu BUMN. Berdasarkan peristiwa tersebut seharusnya bangsa Indonesia belajar untuk ikut serta melindungi benteng terakhir lembaga anti rasuh agar tidak disusupi Kuda Troya yang kemudian menggerogoti lembaga anti rasuh tersebut.

Berdasarkan tiga buah faktor tersebut, bangsa Indonesia harus belajar dari para pendiri bangsa. Para pendiri bangsa khususnya Bung Hatta rela menghabiskan segala apa yang dimilikinya untuk kemajuan negara. Generasi era Bung Hatta bahkan rela melepaskan simbol-simbol kekayaannya dan bersama-sama menderita untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Hal itu tercermin dalam kisah tentang keanggotaan Arnold Mononutu di Perhimpunan Indonesia.

Belanda ketika itu memberikan surat peringatan bagi seluruh pegawai negeri Belanda yang memiliki anggota keluarga dan bergabung dengan Perhimpunan Indonesia harus segera keluar dari organisasi terlarang itu (Mohammad, 2011). Surat itu diberikan kepada Arnold Mononutu untuk memutuskan sendiri apakah masih bergabung dengan Perhimpunan Indonesia atau keluar. Ayah Arnold Mononutu menegaskan bahwa jika melanjutkan keanggotaan di perhimpunan Indonesia, maka uang saku dan pembiayaan kuliah dihentikan.

Arnold ketika itu sangat bimbang karena masih membutuhkan pembiayaan dari orang tua untuk kuliahnya di Belanda. Akan tetapi, anggota Perhimpunan Indonesia dan ketuanya yaitu Mohammad Hatta meyakinkan diri Arnold untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Dorongan dari perhimpunan Indonesia membuat Arnold memutuskan untuk terus ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Untuk kehidupan dan biaya kuliah, anggota Perhimpunan Indonesia mengumpulkan dana agar dapat membantu biaya kuliah Arnold. Surat yang diberikan kepada Arnold dianggap sebagai bentuk langkah pemerintah Belanda menghentikan aktivitas perjuangan kemerdekaan. Hal itu dilakukan karena pada zaman itu pilihan bagi kaum elite (priyayi) hanya ada dua yaitu mengikuti Belanda dengan jaminan kemakmuran atau memilih merdeka dengan konsekuensi dimiskinkan.

Generasi era pra-kemerdekaan benar-benar mengajarkan kita untuk mencintai tanah air. Bahkan cita-cita mulia kemerdekaan Indonesia lahir karena adanya kejujuran untuk mengungkapkan penindasan yang dilakukan penjajah (Duiys, 1985:140). Bung Hatta mengajarkan kepada kita bahwa kejujuran kami melarang kami jadi penakut!

Referensi:

- Anisa Rizki. 2022. "Rektor Unila Ditangkap KPK, Diduga Dapat Rp 5 M dari Suap Jalur mandiri" Diakses pada tanggal 22 Agustus 2022 di laman <https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-6245952/rektor-unila-ditangkap-kpk-diduga-dapat-rp-5-m-dari-suap-jalur-mandiri>
- Duiys, J.E.W. 1985. Membela Mahasiswa Indonesia di Depan Pengadilan Belanda. Jakarta: Gunung Agung
- Mohammad Hatta. 2011. Untuk Negeriku: Berjuang dan Dibuang. Jakarta: Kompas.
- Setiyono, B. 2017. Understanding corruption at local level post decentralization: Evidence from four case studies. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 8(1), 27-62. doi: 10.14710/politika.8.1.2017.27-62.
- Yuniar Dwi Sartika dan Hudaniah. 2018. Gaya Hidup Hedonis dan Intensi Korupsi pada Mahasiswa Pengurus Lembaga Intra Kampus. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan Universitas Muhammadiyah Malang* Vol. 6 No. 2.

MENCIPTAKAN HATTA DARI DESA: PEMBERANTASAN KORUPSI DANA DESA

Oleh: Pradikta Andi Alvat

Salah satu tokoh bangsa yang dikenal memiliki idealisme dan integritas tinggi terkait sikap antikorupsi dalam hidupnya adalah Moh. Hatta. Idealisme dan integritas tinggi Hatta dalam antikorupsi terlihat dari dua hal. Pertama, pemikiran. Kedua, laku hidup.

Perihal pemikiran, misalnya terlihat dalam perdebatan pada sidang BPUPKI dan PPKI tentang perlu tidaknya hak asasi warga negara diatur dalam konstitusi. Hatta berpendapat bahwa hak-hak asasi warga negara harus diatur dalam konstitusi sebagai wujud perlindungan hak asasi warga negara sekaligus sebagai mekanisme kontrol bagi negara agar tidak terjerembab dalam labirin otoritarianisme dan korupsi. Selain itu, pada surat kabar Kompas edisi 23 September 1970, Hatta mengatakan seorang koruptor haruslah dijatuhi hukuman terberat. Mengingat korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tugas negara untuk mewujudkan kesejahteraan warga negaranya.

Kemudian dari segi tingkah laku, Moh. Hatta merupakan refleksi dari sikap yang kontradiktif tidak hanya terhadap korupsi konvensional (tindak pidana korupsi) melainkan juga terhadap korupsi non-konvensional (perbuatan-perbuatan koruptif). Misalnya, Moh. Hatta pernah menegur putrinya Gemala Hatta karena mengirim surat dengan memakai amplop dari Konsulat Jenderal RI di Sydney. Menurut Hatta, surat anaknya tersebut merupakan surat pribadi bukan surat dinas (dikutip dari pinterpolitik.com, 23 Agustus 2022).

Hatta juga pernah menolak untuk menggunakan mobil dinas untuk menemui ibunya. Baginya, mobil dinas tidak untuk keperluan personal. Sikap-sikap Hatta tersebut merupakan perwujudan dari nilai integritas dan antikorupsi, yang di zaman sekarang ini semakin teramat langka dimiliki oleh aparatur negara.

Oleh sebab itu, menciptakan Bung Hatta-Bung Hatta baru akan menjadi strategi efektif untuk melawan praktik-praktik korupsi yang saat ini sudah menyebar hingga desa. Perlu dipahami bahwa menciptakan Bung Hatta baru haruslah dibangun by design menggunakan pendekatan sistem baik kultural dan struktural.

Fenomena Korupsi Dana Desa

Dalam kerangka historisitas, dinamika tindak pidana korupsi memang memiliki afiliasi dengan pola dan sistem pemerintahan. Pada masa kepemimpinan orde lama, pola pemerintahan bersifat sentralistik-terpimpin. Kemudian di masa orde baru, pola pemerintahan bersifat sentralistik-otoritarianisme. Pada dua masa tersebut, tindak pidana korupsi pun masih bersifat sentralistik-terpusat pada kekuasaan pemerintahan pusat, mengingat pola pemerintahan desentralisasi belum diterapkan. Setelah orde baru rubuh, dan muncul era reformasi, pola pemerintahan desentralisasi diterapkan. Otonomi daerah tumbuh.

Era reformasi ditandai dengan tumbuhnya spirit kebangsaan untuk melawan praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Oleh sebab itu, struktur dan substansi hukum untuk memberantas korupsi pun dibangun. Lahir Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen pemberantasan korupsi pada tahun 2002. Meskipun substansi dan struktur pemberantasan korupsi diperkuat, namun konsekuensi dari penerapan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, menyebabkan pola tindak pidana korupsi menyebar hingga daerah tidak lagi sentralistik-terpusat.

Kemudian, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014, yang di dalamnya diatur mengenai kemandirian desa untuk mengelola keuangan desa khususnya dana desa mengakibatkan pola korupsi semakin meluas tidak lagi hanya pada pusat dan daerah, tapi juga hingga desa.

Menurut data ICW, sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2020, terdapat 676 terdakwa dari perangkat desa yang terjerat kasus korupsi dana desa, dengan kerugian negara mencapai 111 miliar. Dana desa sendiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Melihat relasi antara pola korupsi dengan sistem pemerintahan sebagaimana direfleksikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sumber dari korupsi adalah adanya kewenangan. Di era orde baru dan orde lama, desa tidak ada korupsi, karena desa belum memiliki kewenangan untuk mengelola dana desa. Setelah lahirnya dana desa melalui amanat UU Desa, korupsi pun meluas hingga desa. Maka dari itu, kunci memberantas korupsi adalah akuntabilitas dan pengawasan kewenangan. Dari situlah, kita bisa mempersempit dan membangun integritas pribadi sebagaimana dimiliki Bung Hatta by system.

Langkah Praksis

Pertama, kritisisme dan partisipasi masyarakat. Masyarakat merupakan garda terdepan untuk mencegah terjadinya praktik tindak pidana korupsi. Peran masyarakat dengan membangun spirit kritisisme dalam menyikapi program-program pembangunan desa sebagai manifestasi penyerapan dana desa, apakah sudah sesuai antara alokasi anggaran dengan realitas fisik. Kritisisme dan partisipasi masyarakat memiliki ruang strategis dalam musyawarah desa (musdes).

Kedua, akuntabilitas digital pemerintah desa. Pemerintah harus membuat peraturan kebijakan untuk mewujudkan good governance dalam sekup pemerintahan desa dengan mendorong akuntabilitas digital melalui kewajiban pembuatan website desa yang berisi informasi, program dan laporan pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan dari program tersebut sehingga seluruh masyarakat desa dapat mengakses dan mengawasinya. Peraturan terkait ini harus disertai sanksi tegas bagi aparatur desa yang tidak menerapkan atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya.

Ketiga, kebijakan laporan harta kekayaan perangkat desa setiap tahun. Pemerintah perlu membuat peraturan hukum terkait kewajiban bagi para perangkat desa untuk melaporkan harta kekayaannya setiap tahun (semacam LHKPN) yang berfungsi sebagai monitoring terkait penambahan kekayaan perangkat desa sebagai sistem mitigasi dini terkait kewajaran penambahan kekayaan perangkat desa apakah ada afiliasi dengan praktik korupsi dana desa.

HATTA: DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA, DAN ANTIKORUPSI

Oleh: Wahyu Ramadhan Rahmat Hrp

Bulan Agustus selain menjadi bulan kemerdekaan, juga merupakan bulan kelahiran dari Mohammad Hatta yang menjadi salah satu Proklamator Kemerdekaan dan Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia. Beliau memiliki andil yang besar dalam membangun pondasi negara ini. Keteladanan dan buah pikirannya sangat berdampak besar dalam pembangunan demokrasi, penegakan hak asasi manusia, dan antikorupsi di Indonesia.

Bung Hatta paham betul, dalam mewujudkan Indonesia yang berkemajuan haruslah menjalankan sistem demokrasi. Sebagaimana yang ditulis oleh Abdul Kohar "Demokrasi ala Bung Hatta" di Media Indonesia, Bung Hatta mendasarkan praktik demokrasi berdasarkan tiga sumber gagasan, yaitu ajaran Islam, asas kekeluargaan dan kebersamaan, serta sosialisme Barat. Hatta ingin proses demokrasi yang berjalan di tengah masyarakat haruslah mengedepankan individu-individu yang bebas untuk berekspresi dan menyuarakan pendapat. Namun kebebasan itu harus disertai dengan rasa tanggung jawab.

Bung Hatta menekankan pentingnya musyawarah mufakat yang didasari dengan semangat kekeluargaan. Hal ini sejalan dengan kebiasaan nenek moyang bangsa Indonesia yang menjadikan musyawarah dalam persoalan-persoalan kehidupan sosial. Bahkan dalam berbagai literatur agama, musyawarah mufakat sebagai bagian dari demokrasi adalah hal yang mutlak. Kokohnya pemikiran Bung Hatta terhadap demokrasi, semata-mata demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang setara tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan golongan.

Beliau meyakini bahwa hak asasi manusia (HAM) adalah milik setiap individu dan harus dijamin oleh negara. Memang di masa pra kemerdekaan, terdapat perbedaan pandangan antara Bung Hatta dengan Bung Karno. Dimana selama sidang BPUPKI sebagaimana yang tertulis di Konstelasi "Debat tentang HAM dalam Penyusunan UUD 1945" disebutkan bahwa bagi Soekarno, hak-hak manusia, hak-hak warga negara tidak dimasukkan ke dalam UUD 1945 karena hak-hak itu didasarkan pada paham individualisme dan liberalisme. Adapun Bung Hatta memandang penting persoalan hak asasi haruslah ditegaskan di konstitusi.

Demikian besarnya perhatian terhadap hak asasi manusia, dapat dilihat dari andil beliau bersama para tokoh lain dalam mengubah sila pertama Pancasila yang semula berbunyi "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-Pemeluknya" menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal ini dilakukan demi menghindari perpecahan yang terjadi di antara masyarakat, sebab Indonesia tidak hanya dihuni oleh pemeluk agama islam saja.

Dibalik prinsip hidup Bung Hatta yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan kesetaraan hak antar manusia, beliau adalah sosok yang sangat anti dengan praktik korupsi. Lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga yang kental akan nilai-nilai agama tentu berpengaruh. Sebagai contoh, Idring Wangsa Widjaja dalam buku Mengenang Bung Hatta menuliskan pengalaman dimana Hatta pernah memarahinya karena menggunakan tiga helai kertas dari kantor Sekretariat Wakil Presiden untuk keperluan pribadi yang padahal merupakan aset negara. Hatta kemudian mengganti kertas tersebut dengan uang pribadinya.

Begitu besar perhatian Bung Hatta terhadap demokrasi, hak asasi manusia, dan antikorupsi. Hal ini tentunya demi kemaslahatan bangsa dan negara Indonesia yang sangat beliau cintai. Namun, 77 tahun sejak kemerdekaan Indonesia diproklamkan, nampaknya apa yang menjadi perhatian tersebut masih mengalami pasang surut.

Di era reformasi yang memberikan kebebasan dalam berdemokrasi ini, Indonesia belum sepenuhnya dewasa. Tidak sedikit kritikan yang dilontarkan melewati batas norma dan etika. Adanya hoaks dan ujaran kebencian dalam berekspresi menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat. Selain itu, kritikan yang diberikan kepada pemegang kekuasaan tak jarang ditanggapi dengan sikap yang represif. Belum lagi dengan pelaksanaan pemilihan umum yang diantaranya diwarnai dengan aksi kecurangan.

Penegakan terhadap hak asasi manusia tentu menjadi hal wajib dalam menjalankan roda bernegara, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar 1945. Pada kenyataannya, masih terdapat kesenjangan dalam berkehidupan sosial. Adanya pembakaran rumah ibadah oleh penganut agama lain dan terbatasnya akses pendidikan serta kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu. Masih belum terselesaikannya kasus-kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia juga menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat.

Korupsi juga menjadi salah satu masalah besar yang belum terselesaikan di Indonesia. Adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memberikan dampak sepenuhnya. Belum selesai dengan satu kasus korupsi, muncul lagi kasus yang lain. Pelemahan-pelemahan yang terjadi dalam usaha pemberantasan korupsi juga menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat. Bahkan Hatta pernah mengatakan bahwa korupsi sudah membudaya di Indonesia.

Bung Hatta akan sangat sedih bila apa yang menjadi perhatiannya belum mencapai hasil yang maksimal di masa kini. Namun, bukan berarti tidak ada harapan. Bangsa dan negara ini masih terus berjuang dalam mewujudkan harapan sang proklamator. Perjuangan generasi muda dalam mempraktikkan semangat berdemokrasi yang santun, menjunjung tinggi hak asasi, menghargai perbedaan, dan kampanye-kampanye antikorupsi yang dilakukan patut diacungi jempol. Usaha-usaha pemerintah dalam mewujudkan situasi yang aman dan damai bagi masyarakat juga wajib diapresiasi.

Di masa yang akan datang, Indonesia diharapkan mampu menjunjung tinggi demokrasi yang berkeadilan sosial. Selain itu, diharapkan Indonesia sudah menuntaskan kasus-kasus hak asasi manusia serta pelaksanaan nilai-nilai hak asasi yang setara tanpa memandang perbedaan. Dengan generasi muda yang bersemangat dalam menyuarakan sikap antikorupsi, kelak Indonesia menjadi negara yang terbebas dari praktik korupsi. Pada akhirnya, semangat dan gagasan Bung Hatta akan terus mengiringi perjalanan bangsa dan negara ini menuju puncak kejayaan.

Referensi

- Kohar, Abdul. 2021. Demokrasi ala Bung Hatta di <https://m.mediaindonesia.com> (diakses 21 Agustus 2022).
- Konstelasi. 2021. Debat tentang HAM dalam Penyusunan UUD 1945 di <https://konstelasi.id> (diakses 21 Agustus 2022).
- Widjaja, Iding Wangsa. 1988. Mengenang Bung Hatta. Jakarta: CV. Haji Masagung.

QUO VADIS: SEMANGAT “ANTI KORUPSI”

Oleh: Yulita Heti Sujaya, M.Pd

Pengantar

Tulisan ini lahir dari kegelisahan sekaligus kecemasan penulis akan masalah korupsi yang terjadi di Indonesia. Bahkan, sejak awal penulis berani untuk mengatakan bahwa korupsi adalah musuh kita bersama. Sebagai musuh bersama, korupsi harus mendapat posisi paling utama dalam proses pencegahan sekaligus penyelesaiannya. Sikap tegas dan berani untuk melawan perilaku korupsi santer didengungkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tagline “Berani Jujur itu Hebat”. Sayangnya, tagline tersebut, tidak lebih dari sepenggal kalimat. Nyaris tidak ada perubahan yang signifikan dalam diri masyarakat bangsa Indonesia. Hal ini terbukti dari semakin meningkatnya jumlah koruptor di Indonesia.

Menanggapi laju perilaku korupsi yang semakin massif, mungkin dan penting bagi kita untuk menghadirkan kembali gagasan dan pemikiran-pemikiran bernas dari salah satu tokoh bangsa ini yaitu Mohammad Hatta atau yang dikenal Bung Hatta. Beliau tak hanya terkenal dan populer dengan gagasan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), melainkan juga perilaku antikorupsi. Penulis sengaja memberi judul seperti ini. Sebuah pertanyaan besar yang senantiasa menjadi refleksi kita bersama, apakah jargon antikorupsi hanya sebatas kalimat yang mudah diucapkan, tetapi sulit dan pura-pura sulit untuk dijalankan? Ataukah jargon tersebut justru memompa semangat kita untuk bangkit dari alam sadar dan dengan tegas serta berani menolak perilaku korupsi? Tulisan ini, sesungguhnya sebuah refleksi kritis sekaligus wujud kontemplatif akan pemikiran-pemikiran kritis dari Bung Hatta.

Fakta Empiris Korupsi di Indonesia

Perilaku korupsi di Indonesia terus mengalami tren yang negatif. Hal ini ditandai oleh sikap dan perilaku responden dalam menanggapi persoalan korupsi. Fakta empiris tentang peningkatan jumlah kasus korupsi, juga beriringan dengan respon publik. Survei yang dilakukan oleh Indikator Politik dengan metode random digit dialing (RDD) dengan sampel sebanyak 1.213 responden. Hasilnya adalah optimisme pemberantasan korupsi bangkit pada Februari 2022 ke angka 33,9 persen masyarakat menilai baik berbanding 31,5 persen yang menilai buruk. Namun, penilaian positif publik itu segera merosot ke angka 28,1 persen pada April 2022. Sedangkan masyarakat yang menilai negatif melonjak ke angka 37,8 persen.

Sementara itu, fakta lain tentang perkembangan kasus korupsi di Indonesia datang dari laporan yang dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mencatat ada 533 kasus korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum (APH) sepanjang 2021. Dari seluruh kasus tersebut, total potensi kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 29,4 triliun. Jumlah kasus korupsi yang berhasil ditindak APH pada 2021 lebih banyak dari tahun sebelumnya, dan cenderung fluktuatif dalam lima tahun terakhir.

Angka-angka yang dirilis oleh lembaga survei di atas tentunya tak sekedar angka yang nirmakna. Pada prinsipnya ada makna yang terkandung dari naik-turunnya angka tersebut. Satu hal yang pasti bahwa, pola penegakan hukum di Indonesia utamanya dalam proses pemberantasan korupsi masih belum maksimal. Hal ini juga diperkuat melalui mekanisme kebijakan pemerintah yang cenderung berlawanan dengan misi pemberantasan korupsi di Indonesia. Berbagai upaya pelemahan terhadap KPK datang silih berganti dengan berbagai rupa. Pelemahan tersebut tidak hanya dilakukan dari luar (eksternal), melainkan juga dari dalam (internal). Pada titik ini, penting bagi kita untuk menghadirkan kembali semangat anti korupsi, bukan hanya dalam tataran ideal, tetapi dalam realitas sehari-hari.

Tak Sekedar Idealisme

Sejak Indonesia merdeka, Bung Hatta sudah mencium aroma korupsi. Bahkan pada tahun 1961, Bung Hatta pernah berucap “Jangan biarkan korupsi menjadi bagian dari budaya Indonesia”. Sayangnya pesan Bung Hatta ini justru dianggap sebagai ajakan bagi segelintir orang (para koruptor) untuk menjadikan korupsi sebagai budaya di Indonesia. Hal ini kemudian mendapatkan jawaban sepenuhnya tatkala praktek-praktek korupsi semakin massif terjadi di Indonesia. Padahal, mantan Sekjen PBB, Kofi A. Annan dalam suatu kesempatan pernah berucap bahwa korupsi itu menciptakan misallocation of resources, dan beban sosial korupsi tidak saja menjadi beban bagi generasi saat ini, namun juga beberapa generasi ke depan.

Filsuf sekaligus penulis asal Italia, Marcus Tullius Cicero, dalam suatu kesempatan pernah berujar demikian “anak muda itu tak cukup hanya bermain di ranah epistemis yang dibuktikan dengan penguasaan banyak teori dan mendapatkan atensi berupa pujian dari sesama, melainkan harus mampu bermain di ranah praktis. Ikut aktif dalam memecahkan beragam persoalan sosial yang ada di masyarakat”. Wejangan yang disampaikan oleh Cicero ini sesungguhnya mengajak kita semua agar jangan terlalu nyaman untuk beridealis, tetapi bagaimana mengungkapkan idealisme itu dalam kehidupan nyata.

Dalam kaitannya dengan tulisan ini, pemikiran-pemikiran kritis yang diwariskan oleh Bung Hatta hendaknya jangan hanya sekedar untuk dilafalkan. Tetapi bagaimana pemikiran-pemikiran tersebut diejawantahkan dalam kehidupan sosial. Misalnya dengan cara yang paling sederhana yaitu tidak melakukan manipulasi, korupsi waktu serta tindakan pemalsuan. Kita harus menjiwai pemikiran-pemikiran tersebut dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan tempat tinggal dan juga tempat kita mendedikasikan diri. Akhirnya, semangat “anti korupsi” akan menjadi nyata dan membuahkan hasil, tatkala seruan itu tak sekedar di bibir saja, tetapi dibuktikan dalam perbuatan sehari-hari kita. Salam!

PROFIL PENULIS

Ahmad Faisal Dinejad, Alumni IAIN Parepare, sekarang aktif pada beberapa komunitas literasi dan menjadi relawan Pendidikan di beberapa tempat pelosok Sulawesi Barat. Penulis Jatuh hati kepada Bung Hatta saat masih menjadi Demonstran kampus.

Akhmad Idris, seorang lelaki lulusan Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang terdampar di Bumi dengan selamat Sentosa pada tanggal 1 Februari 1994. Saat ini menjadi seorang dosen bahasa Indonesia di Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa dan Sastra Satya Widya Surabaya dan STKIP Bina Insan Mandiri Surabaya. Karya solonya yang telah diterbitkan adalah buku kumpulan esai dengan judul *Wasiat Nabi Khidir untuk Rakyat Indonesia* (2020) dan *Permainan Metafora dalam Karya Sastra* (2022). Cerpennya pernah meraih Juara 2 Kategori Umum dalam lomba penulisan cerpen yang diadakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur pada tahun 2021. Beberapa cerpen juga pernah dimuat di beberapa media cetak seperti Harian Rakyat Sultra, Solo Pos, Suara Merdeka, Radar Mojokerto, dan beberapa media online seperti *Himmah Online* milik Universitas Islam Malang, *Mbludus.com*, dan Majalah *Pewara Dinamika* milik Universitas Negeri Yogyakarta. Selain cerpen, puisinya yang berjudul *Rindu Palestina 3* menjadi puisi terbaik menurut Emirbooks (Penerbit Erlangga) dalam lomba yang bertema “Kerinduan pada Palestina”. Puisi tentang bulan Muharram juga terpilih menjadi 20 puisi pilihan dalam lomba menulis puisi yang diadakan oleh Penerbit Emir. Puisi-puisinya yang lain juga dimuat di beberapa media cetak seperti Riau Pos, Bangka Pos, dll. Beberapa opininya juga pernah dimuat di beberapa majalah dan buletin, seperti buletin *Perspektif* edisi satu tahun 2020 milik Universitas Brawijaya Malang dan buletin *Manunggal* milik Universitas Diponegoro. Beberapa artikel ilmiah juga pernah dimuat di dalam Jurnal Pena (Universitas Jambi), jurnal *Salingka* (Kemendikbud), Jurnal Telaga Bahasa (Kemendikbud), Jurnal Medan Makna (Kemendikbud), Jurnal Pembelajaran Bahasa & Sastra (Universitas Negeri Malang), Jurnal Gramatika (Kemendikbud), Jurnal Jembatan Merah (Balai Bahasa Jawa Timur), Jurnal Sirok Bastra (Kemendikbud), dan Jurnal Efektor (Universitas PGRI Kediri). Selain menulis, ia juga sering mengisi beberapa kepelatihan Jurnalistik. Baginya, “Menulis adalah mengukir nama di dunia yang sudah lama fana”.

Annisa Siswanti, lahir di Purwosari, 15 September 1998. Beralamat di Sumatera bagian Utara. Jenjang pendidikan Sekolah Dasar di SDN 056618 Purwosari Desa Tanjung Ibus, Kec. Secanggang, Kab. Langkat. Sekolah Menengah Pertama di SMP Swasta Yapendak Perkebunan Air Batu, Kec. Air Batu, Kab. Asahan. Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Pulau Rakyat, Kec. Pulau Rakyat, Kab. Asahan. Dan lulusan Sarjana Pendidikan Agama Islam di Langkat, Sumatera Utara.

Atha Nursasi, lahir di Baranusa, Kabupaten Alor 17 Agustus 1992, menyelesaikan studi magister Administrasi Publik di Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang. Sekarang aktif di salah satu organisasi masyarakat sipil antikorupsi (NGO) lokal, Malang Corruption Watch (MCW) sebagai koordinator. Pernah menjadi kepala program riset dan monitoring dana desa, menjadi tim riset korupsi politik di daerah khusus di kota batu, Jawa Timur. Dirinya juga menjadi salah satu penulis buku "Demokrasi Dikorupsi" yang sedang proses terbit bersama teman-teman MCW. Untuk aktivitas advokasi dan monitoring isu kebijakan publik, demokrasi, HAM dan antikorupsi. Lebih lanjut dirinya dapat dihubungi melalui Atha17nursasi@gmail.com.

Daniel Pradina Oktavian, berusia 26 tahun. Penulis berdomisili di Jakarta Selatan. Saat ini sedang belajar bersama Pusat Kajian Otonomi Daerah sebagai Asisten Peneliti. Penulis bercita-cita ingin menjadi seorang pejabat publik yang teguh berintegritas layaknya Bung Hatta.

Dendy Yuliyanto, SH, lahir di Jakarta pada tanggal 03 Juli 1997, menyelesaikan pendidikan sarjana Hukum di Universitas Pattimura Ambon pada tahun 2019. Semasa kuliah aktif di beberapa organisasi baik internal kampus maupun eksternal diantaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pattimura Diving Society (PADIS) Universitas Pattimura, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI), Lembaga Eksekutif Mahasiswa Hukum Indonesia (LEMHI) dan Forum Penyelam Mahasiswa Indonesia (FoPMI). Selain aktif diorganisasi senang mengikuti pelatihan-pelatihan Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, berikut pelatihan yang pernah diikuti : Pelatihan Dasar Bantuan Hukum (LKBHMI Cabang Ambon 2018), Pendidikan Profesi Advokat (HAPI 2020), Training Lawyer Advokasi Kebebasan Pers (LBH Pers 2021), Pelatihan Penulisan Artikel untuk Advokasi Publik (LSA & Asia Floor Wage Alliance 2021) Karya Latihan Mahasiswa Bantuan Hukum (YLBHI-LBH Surabaya 2022).

Epifanius Solanta, lahir di Flores, 7 Agustus 1993. Setelah menamatkan pendidikan dari SMA Seminari Pius XII Kisol, Manggarai Timur, Flores, NTT, melanjutkan pendidikannya di Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Lulus pada tahun 2017. Semasa kuliah, aktif menulis di berbagai media baik cetak maupun online. Salah satu buku yang pernah diterbitkannya adalah *Dialektika Ruang Publik, Pertarungan Gagasan* (Penerbit Beta Offset Yogyakarta, 2017).

Janwan Tarigan, lahir pada 01 Januari 1998. Menyelesaikan studi S-1 Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya tahun 2020. Peneliti Malang Corruption Watch (MCW) dan editor naskah buku Intrans Publishing. Penulis dapat dihubungi melalui email janwantarigan@gmail.com.

Karunia Haganta, merupakan mahasiswa Antropologi Universitas Indonesia. Dapat dihubungi melalui karunia.haganta@gmail.com.

Kurnia Ramadhana Banjarnahor, merupakan salah satu Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), tepatnya di Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan. Sebelum bekerja di ICW, Penulis menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan menyelesaikannya pada tahun 2015 lalu. Kurnia juga sempat mengikuti sejumlah pelatihan, khususnya yang berkaitan dengan isu penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan kebijakan publik, diantaranya, Sekolah Antikorupsi Indonesia Corruption Watch, Mastercamp Penyuluh Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, Pendidikan Khusus Profesi Advokat, dan Think Policy Bootcamp Volume 5. Selain melakukan penelitian, sehari-hari Penulis juga terlibat dalam sejumlah advokasi yang berkaitan dengan isu pemberantasan korupsi. Untuk semakin menggaungkan isu pemberantasan korupsi, Penulis juga secara rutin menulis dalam bentuk opini di berbagai media massa.

Kierby, lahir di Medan, Sumatera Utara, tahun 1995. Saya memiliki antusias terhadap dunia literasi, terutama literasi mengenai ilmu pengetahuan, filosofi, dan sejarah. Karena literasi bukan hanya jendela untuk melihat dunia, tetapi juga menyelami alam pikiran dunia.

Maria Goreti Ana Kaka, merupakan karyawan swasta di Jakarta. Perempuan asal Sumba Barat (NTT) ini juga merupakan alumni Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi (2020). Sebelumnya pernah bekerja sebagai jurnalis magang di Surat Kabar Harian Timor Express Kupang. Hingga 2020 menjadi volunteer di IRGSC, sebuah lembaga riset independent dan think tank di Kota Kupang yang berdiri sejak tahun 2015. Sejak SD, selalu ikut serta dan aktif dalam berbagai komunitas orang muda NTT yang fokus dalam isu literasi, antikorupsi, pendidikan, kemanusiaan, dan partisipasi publik. Komunitas tersebut antara lain: Buku Bagi NTT (sebagai sekretaris nasional), Forum Anak Sumba Barat (sebagai fasilitator), dan Pemuda Mendesa (sebagai content coordinator regio Indonesia Timur). Duta Jenama/Brand Ambassador Narabahasa (2022) ini juga sering memproduksi dan membagikan konten kebahasaan yang bisa dilihat di akun Instagram @nanahaibara98.

Muhammad Naufal, merupakan seorang jurnalis di CNN Indonesia.com, lulusan Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran, berminat terhadap isu politik, hukum tata negara, dan korupsi.

Muhammad Sayyid Hanafi, lahir di Kediri 21 Agustus 2001, merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Menempuh pendidikan Madrasah di MIN Gedog Kota Blitar sampai tahun 2014. Kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Kota Blitar dan lulus tahun 2017. Lalu melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Garum, dan saat ini tengah mengenyam pendidikan di S1 Pendidikan IPS Universitas Negeri Malang.

Nanang Suryana, tinggal di Cimahi. Menyukai gunung dan hutan. Menulis beberapa opini dan kolom seputar isu-isu sosial-politik. Aktif di Instagram: @sudutpandangnanang. Korespondensi: nanangsuryana07@gmail.com.

Nazirwan Rohmadi, M. Pd, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juni 1993. Memiliki ketertarikan dengan sejarah sejak duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama. Lulus S1 di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2015. Lulus S2 di Program Studi Magister Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret tahun 2018. Telah menerbitkan 4 buah karya ilmiah yaitu Volksraad: Malay Language (Indonesian) as a Means of Political Strategy of National Fraction, Motion Thamrin: Language Politics and Inlander (Indigenous) Appellation for Indonesian People, Efektivitas Modul Pembelajaran Sejarah Mohammad Husni Thamrin untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa, dan Volksraad (People Council): Radicale Concentratie Political Arena and National Fraction, 1918-1942. Saat ini bekerja sebagai guru di sekolah International Islamic Education Council.

Pradikta Andi Alvat, kelahiran Rembang 20 April 1995. Penulis bekerja sebagai CPNS Analis Perkara Peradilan di Pengadilan Negeri Rembang. Domisili di Desa Landoh RT 01 RW 04 Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Jawa Tengah.

Wahyu Ramadhan Rahmat Hrp, akrab dipanggil dengan nama Wahyu. Lahir pada tanggal 17 Desember tahun 1999 di Kota Pekanbaru, Riau. Wahyu saat ini berdomisili di Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Jejak Wahyu bisa ditemukan di akun Instagram @wahyuharahap01 maupun di akun Facebook Wahyu Ramadhan Rahmat Harahap. Selain itu, bila ingin menghubungi Wahyu dapat melalui e - Mail wahyuharahap2312@gmail.com. Man Jadda Wa Jada, siapa yang bersungguh - sungguh pasti berhasil.

Yulita Heti Sujaya, M.Pd, lahir di Manggarai, Flores, NTT. Setelah menyelesaikan pendidikan S-1 Pendidikan Sejarah di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, ikut berhijrah ke Jakarta. Mengajar Social Studies di Unity School sejak tahun 2017-2022. Sembari mengajar, juga melanjutkan pendidikan S-2 Pendidikan IPS di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta dan lulus tahun 2020.

PROFIL PERKUMPULAN BHACA

Perkumpulan BHACA (Bung Hatta Anti-Corruption Award) adalah organisasi non-profit dan independen yang sadar mengenai bahaya korupsi bagi kelangsungan hidup bermasyarakat dan berbangsa. Bahwa di tengah kehidupan yang korup, ternyata masih ada segelintir orang yang teguh memegang prinsip kejujuran, dan sedapat mungkin menentang korupsi di lingkungannya. Mereka adalah benih-benih perubahan yang perlu terus dipupuk dan disiram agar tumbuh menjadi besar, dan bersamaan dengan itu kepeloporan, gagasan, dan upaya-upaya nyata mereka perlu disebarluaskan agar menjadi teladan dan perhatian bersama.

Perkumpulan BHACA berdiri pada 9 April 2003. Sejak 2003 memberikan penghargaan kepada individu-individu anti-korupsi. Nama Bung Hatta dipilih karena beliau adalah figur bapak bangsa yang memberi teladan untuk berperilaku jujur dan baik dalam hubungan pemerintahan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Bung Hatta juga sepanjang hidupnya tak pernah berhenti melawan setiap bentuk penyimpangan kekuasaan, meskipun dengan itu beliau harus menanggung resiko yang tidak ringan.



BUNG HATTA
ANTI CORRUPTION
A W A R D

